

SKRIPSI

IMPLEMENTASI *SMART* KAMPUNG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SINJAI



Oleh:

Indriati Yulistiani

Nomor Induk Mahasiswa: **105611118220**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

IMPLEMENTASI *SMART* KAMPUNG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SINJAI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik (S. AP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

Indriati Yulistiani

Nomor Induk Mahasiswa: **105611118220**

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

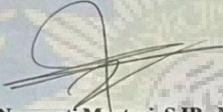
Judul Proposal Penelitian : Implementasi *Smart* kampung Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian Dalam Meningkatkan
Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai

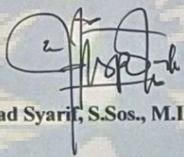
Nama Mahasiswa : Indriati Yulistiani
Nomor Induk Mahasiwa : 105611118220
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

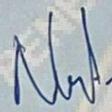

Ahmad Syarif, S.Sos., M.I.Kom

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730 727


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM: 991 742

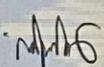
HALAMAN PENERIMAAN TIM

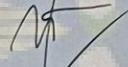
Telah diterima oleh penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0256/FSP/A.4-II/V/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Kamis tanggal 15 bulan Agustus tahun 2024.

TIM PENILAI

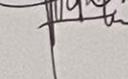
Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730 727


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992 797

PENGUJI

1. Abdul Kadir Adys, SH., MH ()
2. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si ()
3. Wardah, S.Sos., MA ()
4. Ahmad Syarif, S.Sos., M.I.Kom ()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Indriati Yulistiani

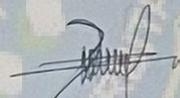
Nomor Induk Mahasiswa : 105611118220

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Mei 2024

Yang menyatakan,



Indriati Yulistiani

ABSTRAK

Indriati Yulistiani 2024, Implementasi *Smart* kampung Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai (dibimbing oleh Nuryanti Mustari dan Ahmad Syarif).

Implementasi Program Smart Kampung dianggap mampu meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Sinjai. Maka dari itu diadakan suatu penelitian yang berhubungan dengan implementasi smart kampung dinas komunikasi, informatika dan persandian untuk mengetahui peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Sinjai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan analisis dokumen untuk memahami bagaimana implementasi *Smart* Kampung dapat meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini megacu pada teori George C. Edward III (1980) yang mencakup empat perspektif, komunikasi: DISKOMINFO berperan sebagai penggerak utama dalam memaksimalkan penerapan Smart kampung di setiap desa di kabupaten sinjai, sumber daya manusia: staf atau admin desa telah memadai dan mampu mengelola program smart kampung, termasuk pengelola website desa, disposisi/respon: respon masyarakat positif karena smart kampung memudahkan pelayanan publik di desa. Dan struktur birokrasi: smart kampung telah berjalan sejak tahun 2019 dengan DISKOMINFO sebagai instansi penanggung jawab yang rutin melakukan pelatihan di setiap desa di Kabupaten Sinjai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Smart Kampung telah diimplementasikan di Kabupaten Sinjai, dengan beberapa desa menunjukkan peningkatan signifikan dalam aksesibilitas dan efisiensi layanan publik. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal partisipasi masyarakat secara luas dan ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung keberlanjutan program.

Kata Kunci: Implementasi, *Smart* Kampung, Pelayanan Publik

ABSTRACT

Indriati Yulistiani 2024, *Implementation of Smart Village of the Communication, Informatics and Cryptography Office in Improving Public Services in Sinjai Regency* (guided by Nuryanti Mustari and Ahmad Syarif).

The implementation of the Smart Village Program is considered to be able to improve public services in Sinjai Regency. Therefore, a study was conducted related to the implementation of smart villages for communication, informatics and cryptography to determine the improvement of public services in Sinjai Regency.

This study uses a qualitative approach with interview methods and document analysis to understand how the implementation of Smart Village can improve public services in Sinjai Regency. This research is based on the theory of George C. Edward III (1980) which includes four perspectives, communication: DISKOMINFO plays the main role in maximizing the implementation of Smart Village in every village in Sinjai District, Human Resources: Village staff or admins are adequate and able to manage the Smart Village program, including village website managers, Disposition/Response: Positive community response because Smart Village facilitates public services in the village. And the bureaucratic structure: smart village has been running since 2019 with DISKOMINFO as the responsible agency that routinely conducts training in every village in Sinjai Regency.

The research results show that Smart Village implementation has been implemented in Sinjai Regency, with several villages showing significant improvements in the accessibility and efficiency of public services. However, there are still challenges in terms of broad community participation and the availability of adequate infrastructure to support program sustainability.

Keywords: *Implementation, Smart Village, Public Service*

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”.

Dengan memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan skripsi yang berjudul Implementasi *Smart* kampung Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga terkhusus dosen pembimbing ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si sebagai pembimbing I dan Pak Ahmad Syarif, S.Sos., M.I.Kom sebagai pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Semoga Allah SWT menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan.

Pada kesempatan ini juga penulis tak lupa mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta yang senantiasa mendoakan dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membina Universitas ini dengan sebaik-baiknya.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina Fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina Fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Segenap Staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis.
7. Kepada saudara-saudara tak sedarah saya, kakak Zulkifli Zulfikar yang telah terlibat dalam proses penelitian saya, serta kakak Iva Yulianingsih bahar yang selalu membinbing saya dan juga menyemagati disaat yang tepat dan saya benar benar membutuhkannya.
8. Kepada Zalika keponakan yang paling lucu yang selalu ikut menemani saya ketika melakukan penelitian di kabupaten sinjai
9. Kepada seluruh keluarga saya yang turut serta dalam mendukung dan mendoakan saya agar mendapatkan yang terbaik.

10. Seluruh teman-teman yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
11. Segenap rekan-rekan civitas akademika Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Amiin

Makassar, 22 April 2024



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Tinjauan Teoritis	11
1. Pengertian Implementasi	11
2. Pelayanan Publik.....	15

3. <i>Smart</i> Kampung	18
C. Fokus Penelitian	20
D. Kerangka Pikir	20
E. Deskripsi Fokus Penelitian	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	23
B. Jenis dan Tipe Penelitian	23
C. Informan	24
D. Teknik Pengumpulan Data	25
E. Teknik Analisis Data	26
F. Teknik Pengabsahan Data	27
BAB IV	29
HASIL PENELITIAN.....	29
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	29
a. Letak Geografis Kabupaten Sinjai	29
b. Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Sinjai.....	30
c. Profil Desa Tongke Tongke.....	48
d. Profil Desa Kampala	51
B. Hasil Penelitian Tentang <i>Smart</i> Kampung.....	55
1. Komunikasi	56

2. Sumber Daya.....	60
3. Deposisi atau Respon.....	62
C. Pembahasan Penelitian.....	68
1. Komunikasi.....	68
2. Sumber daya.....	70
3. Deposisi atau Respon.....	72
BAB V.....	79
PENUTUP.....	79
A. KESIMPULAN.....	79
B. SARAN.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

Table 2. 1 Klaster implementasi <i>Smart</i> kampung dalam pelayanan publik yang terdiri dari 6 klaster dan 34 items.....	10
Tabel 3. 1 Informan Penelitian	24
Tabel 4. 1 Program Unggulan Kabupaten Sinjai 2024.....	63
Tabel 4. 2 Rekap status website desa dan kelurahan kabupaten sinjai.....	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Network Visualization.....	8
Gambar 2.2 Overlay Visualization.....	9
Gambar 2.3 Kerangka Pikir.....	21
Gambar 4.1 Peta Sinjai.....	30
Gambar 4.2 Peta Letak DISKOMINFO Kabupaten Sinjai	31
Gambar 4.3 Struktur Organisasi DISKOMINFO Kabupaten Sinjai.....	33
Gambar 4.4 Peta Desa Tongke-Tongke.....	49
Gambar 4.5 Peta Desa Kampala.....	53
Gambar 4.6 Workshop Smart Kampung	58
Gambar 4.7 Website Desa Tongke-Tongke.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Revolusi industri 4.0, pemerintah dituntut memaksimalkan penggunaan teknologi dengan bertransformasi menjadi lebih baik dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Tetapi dalam praktiknya, pemberian pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah masih mengalami permasalahan. Menurut data ombudsman berbagai permasalahan dalam pelayanan publik telah banyak terjadi baik di tingkat nasional hingga ketingkat daerah. Gejala ini mulai tampak dengan ditandai dengan adanya protes dan demonstrasi oleh berbagai komponen masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit belit, waktu yang terlalu lama, kurang informasi, pemerintah seakan kaku, kurang konsisten dan terbatasnya sarana dan prasarana.

Hal yang paling mendasar untuk dipenuhi terkait dengan kesejahteraan umum telah tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 Alinea ke empat. Pemerintah selaku pihak pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsi-fungsi tersebut harus dijalankan oleh pemerintah secara bersinergi agar kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dapat tercapai. Luasnya peranan pemerintah dalam mengatur dan melayani Masyarakat telah menjadikan pemerintah sebagai suatu jaringan organisasi atau institusi yang strategis terhadap kehidupan serta kebutuhan masyarakat (Mahardhika, 2018).

Kemajuan teknologi informasi saat ini telah memberikan perubahan besar dalam tatanan hidup Masyarakat. Kini perkembangan teknologi telah menjadi indikator kemajuan suatu negara. Pemerintah sebagai pelopor pembangunan negara dalam merespon diharuskan untuk menerapkan teknologi informasi di setiap tata kelola pemerintahannya. Penerapan teknologi pada kegiatan pengelolaan Masyarakat membantu mempermudah proses pertukaran informasi dan peningkatan layanan menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam konteks pemerintah, penerapan teknologi secara masif bermula dari adanya industri presiden nomor 3 tahun 2003 tentang penerapan *elektronik government*. Seperti yang telah dinyatakan oleh Saputro (2016), kualitas informasi, sistem, dan layanan berpengaruh secara positif terhadap kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna dan hasil (tujuan organisasi) merupakan salah satu tujuan utama yang harus dicapai oleh pemerintah dalam memberikan layanan kepada Masyarakat. Penerapan *e-government* pada pemerintah desa dapat menjadi intervensi utama dalam mendorong desa kearah kemajuan (Ridhawati et al., 2019).

Desa merupakan lokomotif pembangunan ekonomi bangsa, karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Seiring luasnya pemanfaatan teknologi informasi baik di lingkup pemerintah hingga menyebar ke seluruh Masyarakat telah mampu mendorong beberapa desa untuk melakukan transformasi struktural menjadi *Smart* kampung melalui intregrasi berbagai elemen-elemen pendukung kesinambungan pedesaan dengan memanfaatkan kecangihan teknologi informasi (Herdina, 2019).

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam struktur kebijakan, yang memerlukan keterlibatan antara pemangku kepentingan untuk menjalankannya. Sebab melalui prosedur ini suatu proses kebijakan secara keseluruhan dapat berdampak pada Tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian suatu tujuan kebijakan (Herlisa Maulidia, 2019). Seiring dengan berkembang pesatnya teknologi dan informasi, perkembangan pembangunan semakin maju, sehingga desa-desa di Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan teknologi dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi, Pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Percepatan pembangunan melalui Desa-Desa mandiri dan pembangunan yang kaitannya dengan ekonomi lokal, antara desa dan kota melalui kawasan perdesaan dilakukan dalam upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota (Gede Gusta Ardiyasa & Ety Rahayu, 2022). Penerapan desa digital ini memungkinkan adanya transparansi, percepatan informasi dan layanan publik, kemudahan akses, promosi SDM dan ekonomi desa, serta peningkatan pengetahuan masyarakat. Transparansi digitalisasi berkaitan dengan keterbukaan informasi, keuangan dan program desa.

Pelayanan publik menurut Sinambela (2007) adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Erlianti et al., 2019).

Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik kepada Masyarakat yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu diambil langkah-langkah untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja dan kegiatan pemerintahan secara terpadu. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian melakukan sinergitas dengan semua desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Sinjai melakukan interaksi langsung dengan masyarakat desa yang diharapkan memberikan pelayanan dengan baik dan maksimal. Oleh karena itu, Kabupaten Sinjai mendorong Program *Smart* kampung dengan melakukan *launching* dua aplikasi terkait layanan mandiri *Smart* kampung dan aplikasi satu data.

Smart kampung merupakan program pengembangan desa terintegrasi berbasis website yang memadukan antara penggunaan teknologi digital, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, dan pelayanan tepat dan cepat. Program *Smart* kampung merupakan bagian dari program-program pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 dalam bentuk program pemanfaatan teknologi digital. Program *Smart* kampung ditetapkan berdasarkan Inpres no 3 Tahun 2003 dan Peraturan Gubernur (PERGUB) provinsi Sulawesi Selatan nomor 131 tahun 2017 tentang penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada senin 4 maret 2024 oleh peneliti dengan salah satu pegawai dinas komunikasi informatika dan

persandian di Kabupaten Sinjai bahwa pelayanan publik kepada masyarakat salah satunya program Smart kampung masih kurang diterapkan pada masyarakat desa yang ada di kabupaten sinjai. Padahal PEMDA kabupaten Sinjai telah meminta pemerintah desa untuk menerapkan program *Smart* kampung, selain itu PEMDA kabupaten sinjai juga telah melaukan *workshop Smart* kampung untuk menyampaikan beberapa kelebihan *Smart* kampung.

Inovasi pelayanan publik *Smart* kampung merupakan program unggulan Bupati Sinjai dalam meningkatkan pelayanan publik mencakup pengembangan *website* desa yang dapat menjadi sumber informasi publik bagi masyarakat, bahkan menjadi bagian dari pelayanan administrasi yang berbasis digital atau *online*. Dalam *website* tersebut dalam hal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melalui *website* desa terdapat fitur layanan mandiri. Sebuah fitur yang dapat menghemat waktu masyarakat. Dengan fitur tersebut untuk mengurus surat menyurat, masyarakat tidak perlu lagi datang dan mengantri di kantor desa, karena sudah dapat diurus dari rumah melalui via online.

Surat yang dapat diajukan dari rumah melalui via online adalah surat-surat yang kerap diurus oleh masyarakat, misalnya:

1. surat keterangan kurang mampu,
2. surat keterangan usaha,
3. surat keterangan KTP sedang diproses,
4. surat keterangan beda identitas,
5. surat keterangan domisili usaha,
6. serta surat keterangan domisili, dan surat lainnya.

Smart kampung di Kabupaten Sinjai sudah berjalan sejak tahun 2019 dan dilaunching secara resmi pada tahun 2021. Instansi penanggung jawab dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai telah melakukan pelatihan, bimbingan serta pendampingan dalam pembuatan dan pengelolaan *website* desa.id bagi 67 desa dan 13 kelurahan yang ada di Kabupaten Sinjai (Pratama, 2023).

Smart kampung dibentuk sebagai upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat, kebijakan *Smart* kampung sebagai upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk melakukan sesuatu secara cerdas dan pintar dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan efisien di suatu wilayah. *Smart* kampung bukan hanya tergantung pada transformasi teknologi saja, tapi lebih penting adalah upaya dalam mendorong pengembangan desa dan memberdayakan masyarakat menjadi lebih baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Kebijakan *Smart* kampung ini membentuk desain desa supaya memiliki kerangka kebijakan yang terintegrasi yaitu memadukan pelayanan publik, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui bidang ekonomi produktif, kreatif, sosial budaya, peningkatan layanan publik serta upaya pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa indikator yang harus dipenuhi agar menjadi *Smart* kampung antara lain penyediaan internet/wifi di ruang publik desa, kantor desa ramah anak, lansia, difabel dan ibu hamil/menyusui serta pelayanan publik berbasis digital. Pemanfaatan teknologi informasi yang inovatif dan kreatif terus digunakan

pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang semakin berkembang dan kompleks. Hal tersebut sejalan dengan program *Smart* kampung yang digagas di Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Smart* kampung di desa atau kelurahan Kabupaten Sinjai, sehingga judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“Implementasi *Smart* kampung Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka untuk memudahkan proses penelitian diperlukan adanya perumusan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi *Smart* kampung Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Implementasi *Smart* kampung Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi *Smart* kampung

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai?



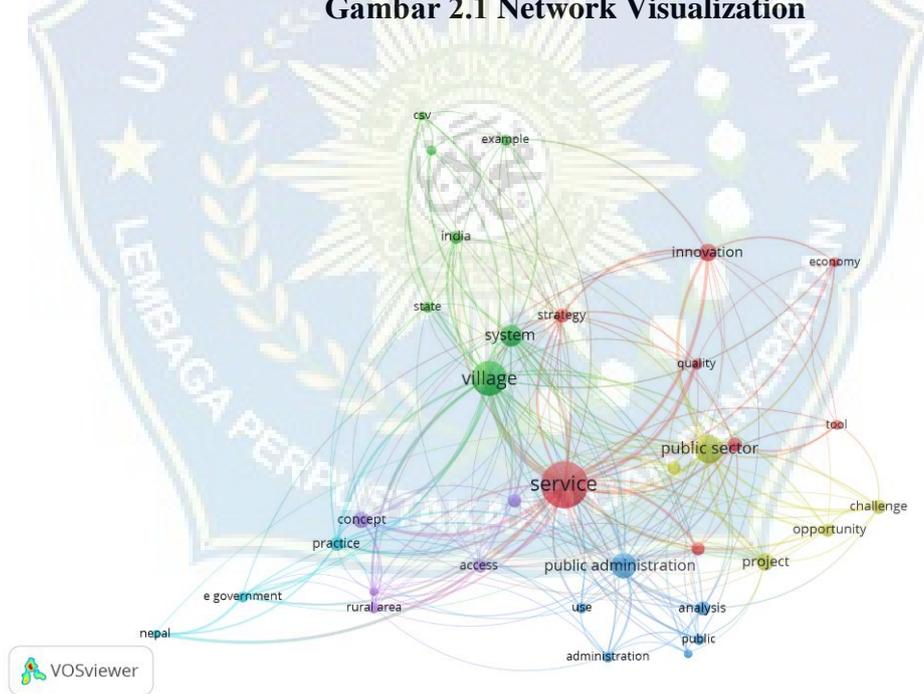
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu peneliti menggunakan *publish or perish* untuk menentukan proyek yang telah melakukan penelitian mengenai Implementasi *Smart* kampung Dinas Komukasi Informatika Dan Persandian Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai, kemudian *vosviewer* digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis jaringan kerja sama antara peneliti, institusi atau topik penelitian.

Gambar 2.1 Network Visualization

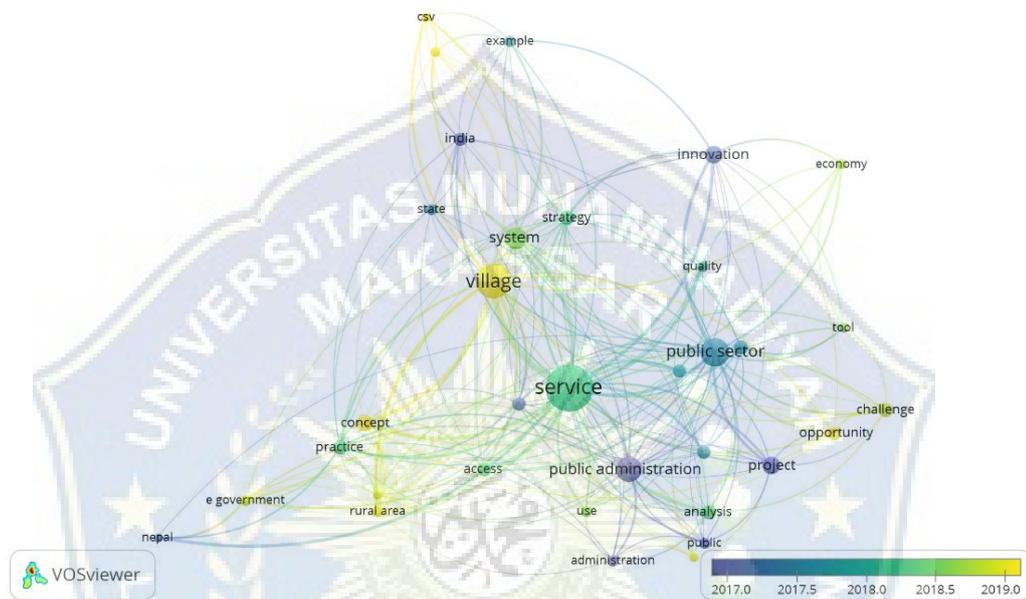


Sumber : vosviewer Analysis

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan menggunakan *publish or perish* ditemukan 200 artikel jurnal dengan rentan waktu 2013-2024 yang dimana berkaitan erat dengan kata kunci implementasi *Smart* kampung, pelayanan publik.

Artikel-artikel tersebut kemudian dikelola menggunakan *vosviewer* untuk menentukan posisi proyek penelitian dari peneliti dengan *Overlay Visualization* sebagai berikut.

Gambar 2.2 Overlay VisualiZation



Sumber: vosviewer Analysis

Hasil dari visualisasi *vosviewer* pada gambar 2.2 dari olah data menggunakan kata kunci “implementasi *Smart* kampung dalam pelayanan publik” dikelompokkan menjadi 6 klaster pada *software vosviewer*, hal ini dapat dilihat pada tabel. 2.1

Table 2.1 Kluster implementasi *Smart* kampung dalam pelayanan publik yang terdiri dari 6 kluster dan 34 items.

Pengelompokan data	data yang termasuk dalam kluster yang sama
Kluster 1 (8 items) merah	Warga negara, ekonomi, inovasi, proses, kualitas, layanan, strategi, alat.
Cluster 2 (7 items) hijau tua	Iklm <i>Smart village</i> , csv, contoh, india, negara bagian, sistem, desa
Cluster 3 (6 items) biru tua	Administrasi, analisis, publik, administrasi publik, pengembangan <i>Smart village</i> , penggunaan.
Cluster 4 (5 items) kuning	Aplikasi, tantangan, peluang, proyek, sektor publik.
Cluster 5 (5 items) ungu	Akses, konsep, kertas, daerah pedesaan, cara.
Cluster 6 (3 items) biru muda	E pemerintah, Nepal, praktek

Dari olah data vosviewer ditemukan 3 pion utama yang menjadi objek dalam penelitian terdahulu, diantaranya penelitian yang membahas tentang defenisi *Smart city*, *Smart region*, *Smart village*, dan *technopolis* sebagai sebuah konsep inovatif dalam tema pembangunan perkotaan dan regional di Indonesia untuk mencapai keberlanjutan (Sutriadi, 2018). Kemudian, terdapat penelitian yang membahas tentang kajian dan pengembangan desa sebagai *Smart village* di India (Choudhary et al., 2021). Serta pion terakhir pada penelitian terdahulu juga membahas tentang “*Smart village*” sebagai Cara Mencapai Pembangunan

Berkelanjutan di Kawasan Pedesaan Polandia (Adamowicz & Zwolinska-Ligaj, 2020).

Dalam visualisasi *vosviewer* tidak terdapat penelitian yang membahas tentang implementasi *Smart* kampung dinas komunikasi informatika dan persandian, akan tetapi pada visualisasi *vosviewer* kebanyakan penelitian terdahulu membahas mengenai pengembangan *Smart village* di sebuah pedesaan. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang direncanakan yaitu pada penelitian terdahulu membahas mengenai defenisi *Smart* kampung, pengembangan *Smart* kampung dan *Smart* kampung sebagai sarana untuk pembangunan berkelanjutan di pedesaan, sedangkan pada penelitian ini akan membahas implementasi *Smart* kampung dinas komunikasi informatika dan persandian dalam meningkatkan pelayanan publik yang ada di kabupaten Sinjai. Pada penelitian terdahulu juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi melalui aspek pengembangan pariwisata, *homestay*, dan *homeindustry*. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada penggunaan teknologi digital, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, dan pelayanan tepat dan cepat.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Implementasi

Implementasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istila suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implemetasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu

tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Implementasi adalah merupakan salah satu tahap dalam suatu proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.(Firdaus Suwestian et al., 2015)

(Mulyasa, 2010) Implementasi merupakan suatu proses penetapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. pengertian implementasi menurut Mclaughlin dan Schubert dalam oleh Nurdin dan basyiruddin (2003:70) secara sederhana implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi merupakan sistem rekayasa. Dalam pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, Tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar altivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Syukur dalam (Novan Mamoto, 2018) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

- a. adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan

- b. target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.
- c. unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Adapun implementasi menurut para ahli yakni, menurut Usman (2002) dalam (Rosad, 2019), mengemukakan pendapatnya tentang implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, Tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Dari pengertian implementasi yang dikemukakan oleh Usman, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

(Nubatonis et al., 2014) Implementasi prinsip-prinsip good government dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik:

- a. Profesionalitas

Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya.

- b. Akuntabilitas:

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip dalam pelayanan publik yang meliputi kepastian dan ketepatan waktu pelayanan kepada masyarakat dan

memperhatikan apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan SOP pelayanan yang berlaku.

c. Transparansi:

Prinsip transparansi merupakan penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Pemerintah wajib memberikan informasi yang relevan secara tepat dan jelas kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Pelayanan Prima

Pelayanan prima merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan perusahaan atau organisasi tertentu untuk memberikan pelayanan maksimal dengan tujuan agar pelanggan atau masyarakat bisa mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang dilakukan.

e. Partisipatif

Semua warga Negara mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka.

f. Efisiensi dan Efektifitas

Pemerintahan yang baik harus efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya. Efektivitas diukur dari dampak kebijakan terhadap masyarakat, sementara efisiensi berfokus pada penggunaan sumber daya yang optimal.

g. Supermasi Hukum

Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara.

Implementasi kebijakan menurut Goerge C Edward III (1980) dalam (Turhundayani, 2020) dipengaruhi oleh beberapa perspektif antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi/respon, dan struktur birokrasi.

- a. Komunikasi, merupakan proses pertukaran dan pemahaman informasi antara dua pihak atau lebih. Proses ini melibatkan pengirim pesan, penerima pesan, dan saluran komunikasi.
- b. Sumber daya adalah segala sesuatu, baik berupa benda nyata maupun bukan benda nyata, yang terdapat pada satu wilayah dan yang dapat dimanfaatkan manusia untuk kelangsungan hidupnya.
- c. Disposisi tanggapan atau intruksi yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya untuk segera di tindak lanjuti.
- d. Struktur Birokrasi adalah struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah Lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur

2. Pelayanan Publik

Istila pelayanan disebut juga sebagai pengabdian dan pengayoman. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pelayana memiliki tiga makna yaitu perihal atau cara melayani, Usaha melayani kebutuhan orang lain dengan

memberikan imbalan (uang), dan Kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.

Konsep pelayanan pada umumnya diartikan sebagai suatu hal yang bermakna tentang membantu. Menurut Indrawan (2011:401) bahwa pelayanan diartikan sebagai suatu tanda untuk membantu, menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan menurut Moenir (2001:45) bahwa pelayanan merupakan proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang secara langsung.

Pelayanan publik menurut Sinambela (2007) dalam (Erlianti et al., 2019) adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Adapun menurut (Rahmadana, 2020) Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan pembiayaan maupun gratis guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat.

Prinsip-prinsip pelayanan publik adalah pedoman yang harus diikuti oleh instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang memberikan layanan kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa prinsip utama pelayanan publik:

1. **Transparansi:** Informasi mengenai prosedur, biaya, dan waktu pelayanan harus terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

2. Akuntabilitas: Setiap tindakan dan keputusan dalam pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Partisipasi: Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pelayanan publik.
4. Responsivitas: Pelayanan publik harus cepat dan tanggap terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat.
5. Kesetaraan dan Non-Diskriminasi: Pelayanan publik harus diberikan secara adil kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, ras, agama, atau gender.
6. Efisiensi dan Efektivitas: Pelayanan publik harus dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
7. Profesionalisme: Pelayanan publik harus diberikan oleh tenaga yang kompeten, beretika, dan memiliki integritas tinggi.
8. Keberlanjutan: Pelayanan publik harus direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang.
9. Aksesibilitas: Pelayanan publik harus mudah diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau geografis.
10. Kepastian Hukum: Pelayanan publik harus diberikan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menjamin hak-hak masyarakat.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Tujuan pelayanan publik adalah memberikan kepuasan dan layanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Agar dapat mencapai target tersebut maka kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat harus menjadi target pemerintahan.(Rahmadana, 2020)

3. Smart Kampung

Smart kampung merupakan salah satu konsep yang berasal dari *Smart City*. Konsep tersebut merupakan salah satu konsep yang melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menyelesaikan permasalahan pemerintahan, khususnya pemerintahan desa (Nursetiawan, 2020).

Smart kampung adalah suatu konsep desa pintar yang mengadopsi komponen-komponen atau indikator dari konsep *Smart City* namun dengan skala yang lebih kecil (wilayah desa atau kelurahan) dengan tujuan untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang lebih baik terhadap warganya (Agung Saputra & Rahman Isnain, 2021).

Konsep *Smart village* atau Desa Cerdas adalah inisiatif berbasis komunitas yang digagas untuk memanfaatkan teknologi informasi bagi masyarakat pedesaan. Inisiatif ini merupakan upaya untuk mencerahkan dan mengedukasi masyarakat lokal dengan memobilisasi kekuatan kolektif komunitas dari berbagai suku/etnisitas dan profesi untuk mendorong pelaksanaan program pelayanan publik berkualitas yang diintegrasikan dengan teknologi informasi dan

komunikasi (TIK) agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Kehadiran *Smart village* atau desa cerdas diperlukan sebagai upaya untuk mengakselerasi pembangunan desa dengan cara meningkatkan kecerdasan, kesejahteraan, dan keharmonisan masyarakat lokal (Rambutan & Banyuasin, 2022).

Smart kampung merupakan hal yang penting, tidak hanya dari sisi tersedianya regulasi untuk membangun desa menjadi mandiri, tetapi juga mengingat perkembangan digitalisasi saat ini yang berpengaruh besar bagi perkembangan desa, terutama terhadap pola perilaku masyarakat. Salah satu cara untuk mengantisipasi pengaruh tersebut adalah dengan menciptakan dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat melalui pembentukan *Smart* kampung. Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat mampu membangun desanya dengan mengembangkan desa berbasis teknologi informasi (Herdiana, 2019)

Menurut Herdiana, Dian (2019) menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) elemen pokok *Smart village*, yakni *Smart government*, *Smart community* dan *Smart environment*. Ketiga elemen itu menjadi dasar untuk mencapai tujuan pengembangan *Smart village* berupa “*Smart relationship*” yakni keterjalinan konstruktif yang muncul dari relasi ketiga elemen *Smart kampung* tersebut.

Smart kampung yang berorientasi pada pelayanan, maka mengharuskan pelayanan kepada masyarakat desa bukan hanya berupa informasi satu arah, tetapi dapat pula informasi dua arah yang mengarah pada hubungan *feedback* atau timbal balik antara masyarakat desa terhadap Pemerintah Desa dan sebaliknya.

Konsepsi dasar dalam penerapan dari *Smart* kampung, yakni berkaitan dengan teknologi informasi dan digitalisasi dalam penyusunan, serta penentuan kebijakan yang akan diimplementasikan.

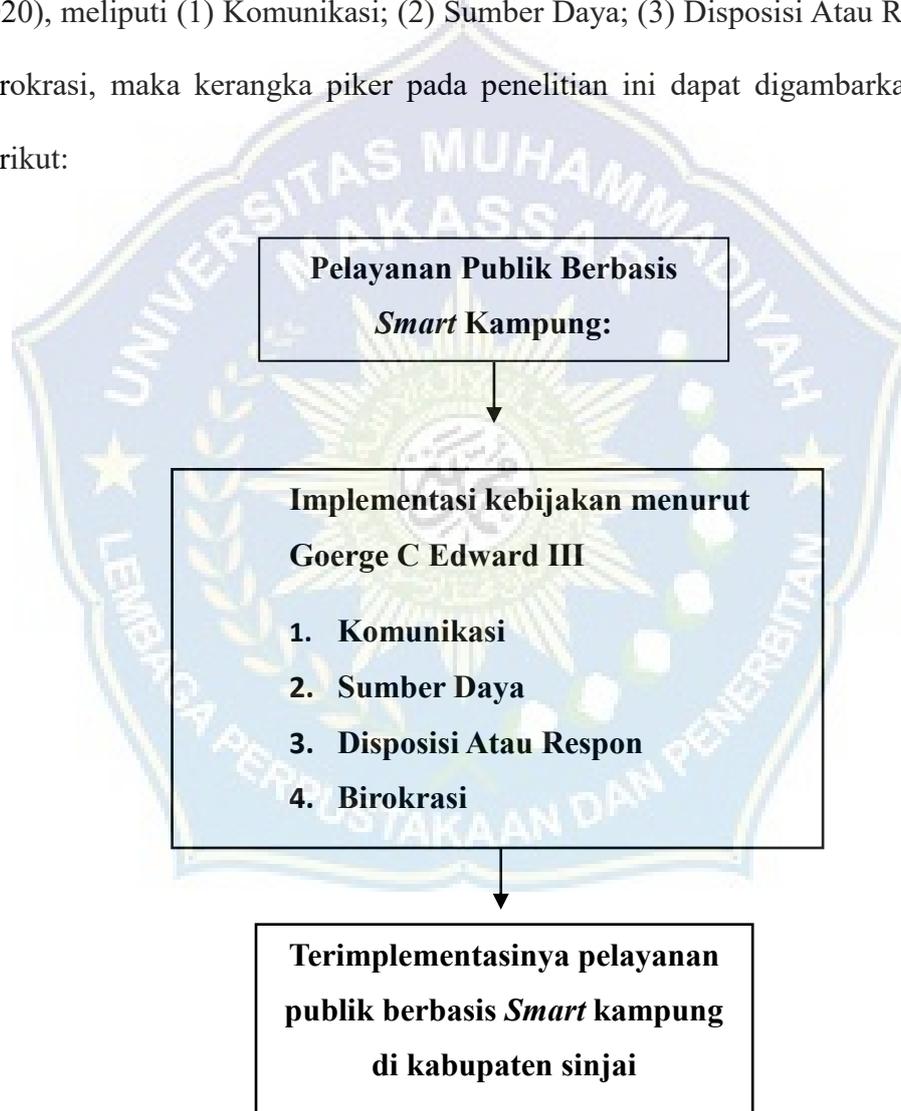
C. Fokus Penelitian

Implementasi *Smart* kampung merupakan pelayanan publik terhadap masyarakat secara digital, bagaimana masyarakat merasa puas dan terlayani dengan berbagai kebutuhan mereka dengan inovasi berupa *Smart* kampung yang dihadirkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sinjai, dan juga melihat apakah inovasi tersebut dapat mendekatkan masyarakat terhadap layanan yang efektif dan efisien, tidak lagi menjadikan masyarakat menghabiskan waktu cukup lama dalam menyelesaikan berbagai kebutuhan mereka, utamanya secara administrasi. sehingga dalam hal ini, upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah perlu memanfaatkan berbagai platform online seperti *website*, aplikasi seluler, dan media sosial. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat sistem e-government dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian, digitalisasi memainkan peran penting dalam memajukan pelayanan publik dan meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Maka dari Pernyataan diatas peneliti mengambil indikator Implementasi kebijakan menurut Goerge C Edward III (1980) dalam (Turhindayani, 2020) yang dipengaruhi oleh beberapa perspektif antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi/respon, dan struktur birokrasi.

D. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui Implementasi *Smart* kampung Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai, yang akan dianalisis berdasarkan implementasi kebijakan menurut Goerge C Edward III dalam (Turhindyani, 2020), meliputi (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi Atau Respon; (4) Birokrasi, maka kerangka piker pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan fokus penelitian, Maka dikemukakan deskripsi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Komunikasi yaitu penyampaian informasi kepada seluruh desa atau kelurahan mengenai penerapan *Smart* kampung terhadap pelayanan publik di Kabupaten Sinjai.
2. Sumber daya, kemampuan sumber daya manusia dan fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam mengelola pelayanan publik berbasis *Smart* kampung terhadap masyarakat desa atau kelurahan di Kabupaten Sinjai.
3. Disposisi, Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratik. Disposisi ini biasanya melibatkan penugasan atau penentuan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh staf atau unit kerja tertentu untuk menangani isu tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik dalam pengimplementasian *smart* kampung di kabupaten sinjai.
4. Struktur Birokrasi, koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab dalam pengimplementasian *Smart* kampung di kabupaten sinjai.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 29 maret 2024 sampai dengan 29 mei 2024

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Sinjai.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2005:6) dalam (Dr. Hj Abdul Fattah Nasution, 2023) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi terhadap suatu fenomena dengan pengolahan data yang menghasilkan analisis deskriptif terhadap objek penelitian berupa kalimat verbal Penelitian kualitatif harus didukung dengan ekstensif sepengetahuan peneliti, karena peneliti langsung mewawancarai subjek (Sahir, 2022).

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang Impelementasi *Smart* kampung Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai.

Menurut Creswell (2014), penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau manusia. Penelitian ini berfokus pada proses, makna, dan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena dalam konteks aslinya.

C. Informan

Informan yang akan terlibat dalam penelitian ini, merupakan orang-orang yang dianggap dapat mengetahui dengan baik objek yang akan diteliti. Kemudian untuk menetapkan informan tersebut, maka penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yang dimana Teknik ini memilih informan dengan mempertimbangkan secara matang, dan dianggap paling sesuai untuk penelitian ini. Kemudian Teknik selanjutnya *Accidental Sampling*, yaitu merupakan Teknik yang dimana informan diambil secara tidak sengaja dan ditemui pada saat berada di lokasi penelitian serta dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan.

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Inisial	Unsur jabatan
1	Haryanti Arief,S.Si., MM	HA	Pranata Komputer Ahli Muda
2	Darmansyah S. AP	D	Kaur tata usaha dan umum
3	Muhammad Arfah S. Pd.I	MA	Sekretaris desa
4	Dewi Fitriani	DF	Masyarakat
5	Nurlinda	N	Masyarakat
Jumlah		5	

Sumber: Hasil diolah peneliti 2024

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah Teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, secara instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah menurut (Sahir, 2022):

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti terjun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala-gejala yang diteliti, setelah itu peneliti dapat menguraikan permasalahan-permasalahan yang muncul yang dapat

dihubungkan dengan teknik pengumpulan data lain seperti survei atau wawancara, dan hasilnya dihubungkan dengan teori dan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan Implementasi *Smart* kampung Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai

2. Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung kepada informan yang berdasarkan pada tujuan penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan penulis adalah dengan mencatat berdasarkan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sehubungan dengan pertanyaan penelitian yang telah ditentukan dengan mengunjungi langsung lokasi para informan berada dengan membawa pedoman pertanyaan yang telah di susun agar mempermudah dalam wawancara. Wawancara ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang dijelajahi.

3. Dokumentasi

Tenik dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi Teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan- bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan pengecekan keabsahan data.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam (Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, 2019) analisis data kualitatif terdiri dari 3 alur Kegiatan yang

terdapat secara bersamaan meliputi reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Setelah memperoleh data, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data melalui proses reduksi data. Ini berarti menggabungkan, memilih, dan menyaring informasi penting, serta fokus pada elemen-elemen yang relevan untuk menemukan tema dan pola-pola tertentu.

2. Penyajian Data

Pada tahap penyajian data, yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif atau kata-kata yang mudah dipahami.

3. Verifikasi dan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah melalui proses reduksi data dan penyajian data.

F. Teknik Pengabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan tehnik triangulasi. Dimana triangulasi merupakan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara, dan berbagai waktu dengan penjelasan sebagai berikut menurut (Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, 2019):

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber mengacu pada langkah membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk mengukur tingkat kepercayaan data. Contohnya,

membandingkan hasil pengamatan dengan pernyataan pribadi atau membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan memperoleh data dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Sebagai contoh, data yang dikumpulkan melalui wawancara dapat diperiksa melalui observasi atau dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Faktor waktu juga memengaruhi kredibilitas data. Data yang diperoleh melalui wawancara pada pagi hari, ketika narasumber masih segar dan belum banyak masalah, cenderung memberikan data yang lebih valid dan kredibel. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan memeriksa hasil penelitian dari tim peneliti lain yang memiliki tugas pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis Kabupaten Sinjai

Kabupaten Sinjai adalah salah satu dari 24 Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pantai timur bagian selatan jazirah Sulawesi selatan yang berjarak lebih kurang 223 km dari Kota Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan). Kabupaten Sinjai yang memiliki luas 819,96 km² terdiri dari 9 Kecamatan defenitif dengan jumlah Desa sebanyak 67 dan 13 Kelurahan. Secara Geografis Kabupaten Sinjai terletak antar 5⁰2'56'' sampai 5⁰21'16'' Lintang Selatan dan antara 119⁰56'30'' sampai 120⁰25'33'' Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone, di sebelah Timur dengan Teluk Bone, di sebelah selatan dengan Kabupaten Bulukumba dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Gowa.

Secara Morfologi, daerah sinjai lebih dari 55,5% terdiri dari daerah dataran tinggi (100-500 meter dari permukaan laut). Secara klimatologi terletak pada posisi iklim musim timur dimana bulan basah jatuh antara bulan April sampai Oktober dan bulan kering antara Oktober sampai April. Secara ekonomi, daerah ini memiliki letak strategis karena memiliki dua jalur perhubungan, yaitu darat dan laut. Jalur darat menghubungkan Kota Kabupaten atau Kota Provinsi yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Sedang jalur laut digunakan untuk hubungan antar daerah di luar Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemerintahan Kabupaten Sinjai secara administrasi terdiri dari 9 Kecamatan definitif. Berdasarkan data dari bagian pemerintahan kantor sekretariat daerah Kabupaten Sinjai, pada tahun 2015 terdapat 67 Desa definitif, 13 Kelurahan dan 354 Dusun/Lingkungan. Pemerintahan Kabupaten Sinjai secara administrasi terdiri dari 9 Kecamatan definitif. Berdasarkan data dari bagian pemerintahan kantor sekretariat daerah Kabupaten Sinjai, pada tahun 2015 terdapat 67 Desa definitif, 13 Kelurahan dan 354 Dusun/Lingkungan.

Gambar 4.1 Peta Sinjai



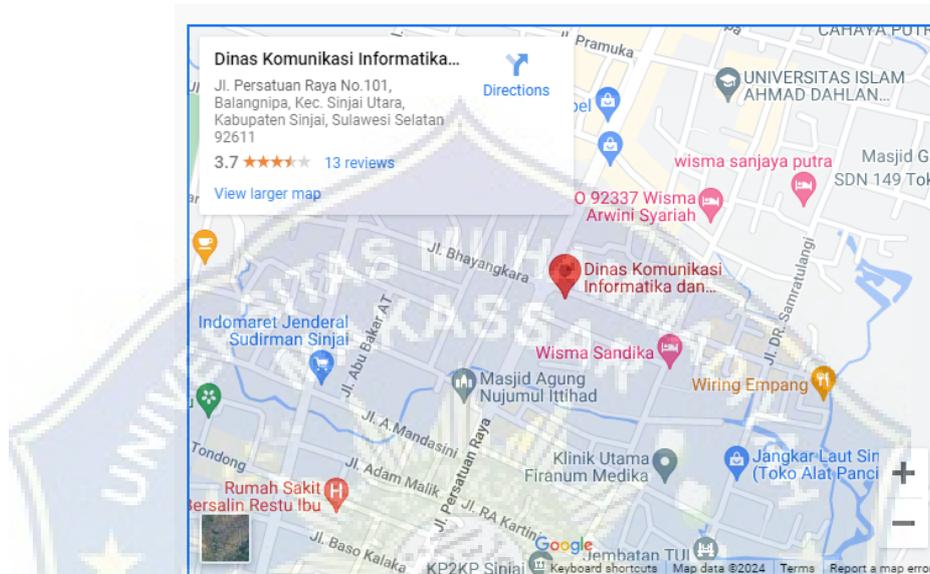
Sumber: Badan Pusat Statistik Sinjai

b. Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Sinjai

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berlokasi di Jalan Persatuan Raya No.101, Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai bertanggung jawab

atas berbagai kegiatan terkait dengan komunikasi dan teknologi informasi di wilayah yang ditempati.

Gambar 4. 2 Letak DISKOMINFO Kabupaten Sinjai



***Sumber: Website Resmi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sinjai***

Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian (Diskominfo dan Persandian) merupakan instansi yang bergerak di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi telekomunikasi, serana komunikasi dan deseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik.

Adapun visi dan misi dari Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian di Kabupaten Sinjai, yaitu:

a. Visi

- 1) Terdepan dalam layanan informasi dan komunikasi berbasis teknologi. Artinya Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menjadi pusat layanan informasi dan komunikasi di Kabupaten Sinjai dengan berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini maupun akan diadakan kedepannya. Dengan kemajuan perkembangan teknologi saat ini Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian akan menjadi pelopor dan pusat dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyebaran dan pelayanan informasi;
- 2) Masyarakat Sinjai bersatu dan sejahtera. Artinya wujud dari pelaksanaan misi Kabupaten Sinjai dan didukung oleh misi dari tiap instansi pemerintah daerah yang bertekad mewujudkan masyarakat Sinjai yang sejahtera unggul dalam kualitas hidup

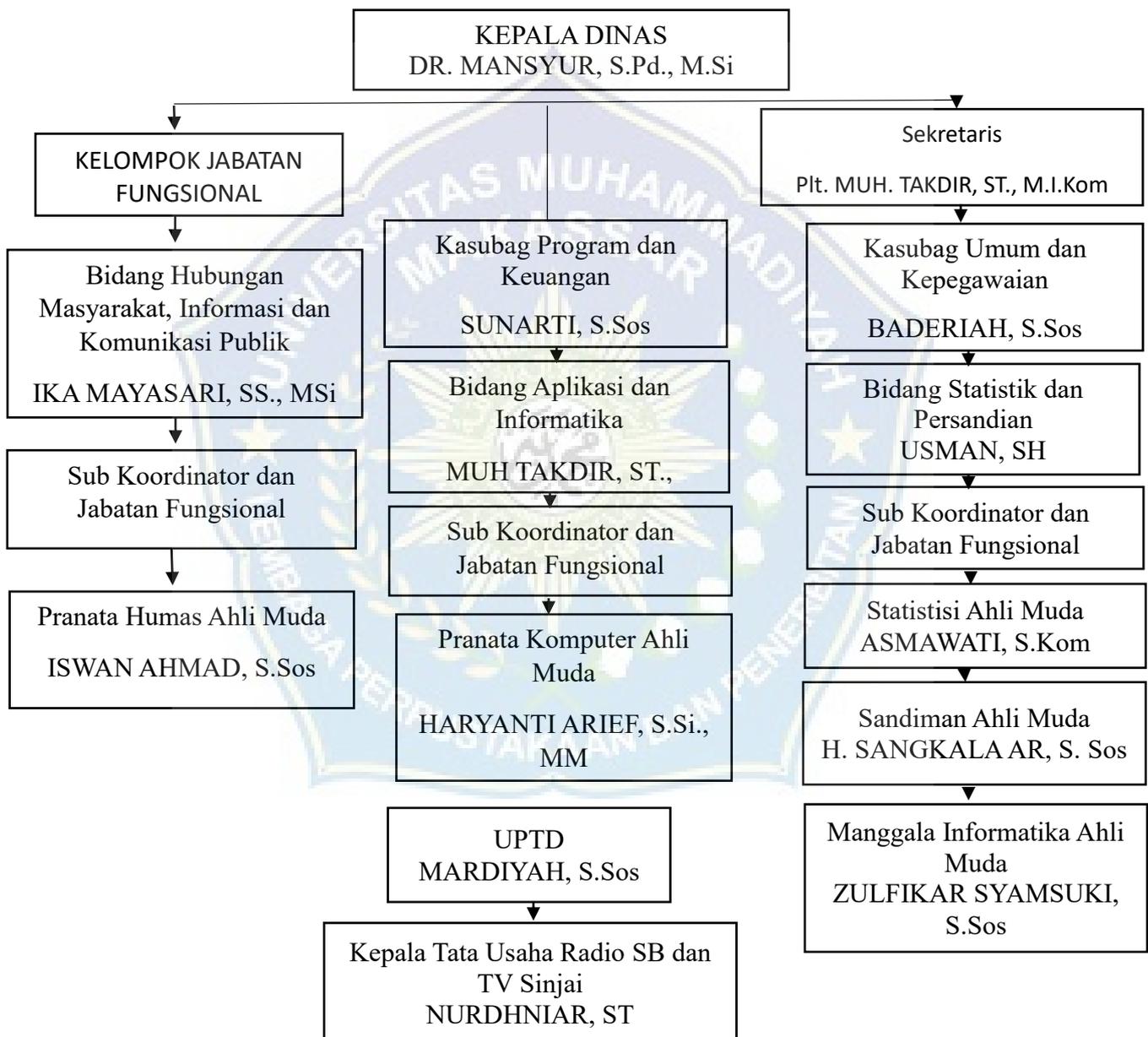
b. Misi

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber daya aparatur bidang komunikasi, informatika dan persandian;
- 2) Mempercepat penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan (e-governance) di setiap sektor pembangunan;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi melalui pendayagunaan multimedia secara berimbang, cepat dan akurat

Berikut adalah gambar struktur organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai:

Gambar 4. 3 Struktur Organisasi DISKOMINFO Kabupaten Sinjai



Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai

Dengan adanya struktur organisasi maka dapat diketahui tugas pokok dan fungsi masing masing unsur tersebut dalam menjalankan organisasi. Adapun tugas pokok dan fungsi setiap unturnya adalah sebagai berikut:

Keputusan bupati Sinjai nomor 37 tahun 2018 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja dinas komunikasi, informatika dan persandian:

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika dan persandian;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang komunikasi, Informatika dan persandian;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika dan persandian;
- 4) pengelolaan Administrasi Umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, Informatika dan persandian; dan

- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) meliputi:

- 1) merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika dan persandian;
- 2) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang komunikasi, Informatika dan persandian;
- 3) membina dan melaksanakan tugas di bidang komunikasi, informatika dan persandian;
- 4) mengelola administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
- 5) melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, Informatika dan persandian; dan
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

b. Sekretariat

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.
- 2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
 - b) pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
 - c) pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
 - d) pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; dan
 - e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
4. Tugas pokok dan fungsi Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a) mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
 - b) mengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;
 - c) mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d) mengoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan
 - e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- c. Sub bagian program dan keuangan
- 1) Sub bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja serta pengelolaan administrasi keuangan.
 - 2) Tugas pokok Kepala Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) menyusun rencana kegiatan Sub bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan pengelolaan administrasi keuangan;

- b) menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub bagian Program dan Keuangan;
- c) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- d) menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Dinas;
- e) memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkungan Dinas;
- f) menyusun laporan kinerja Dinas meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan;
- g) meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- h) melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- i) menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggung Jawaban, dan Tahunan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas;
- j) melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

d. Sub bagian umum dan kepegawaian

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan Dinas.
- 2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
 - b) menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c) melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - d) memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
 - e) melaksanakan tugas keprotokoleran;

e. Bidang informasi dan komunikasi publik

- 1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan opini dan media

komunikasi publik, pengelolaan dan integrasi sistem informasi, sumber daya komunikasi publik kerjasama antar lembaga.

2) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan petunjuk teknis pengelolaan opini dan media komunikasi publik, pengelolaan dan integrasi sistem informasi, sumber daya komunikasi publik kerjasama antar lembaga;
- b) penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan opini dan media komunikasi publik, pengelolaan dan integrasi sistem informasi, sumber daya komunikasi publik kerjasama antar lembaga;
- c) penyelenggaraan informasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
- d) penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media;
- e) penyelenggaraan pembinaan jasa usaha komunikasi dan informasi dan kegiatan operasional usaha komunikasi;

3) Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a) menyusun petunjuk teknis pengelolaan opini dan media komunikasi publik, pengelolaan dan integrasi sistem informasi, sumber daya komunikasi publik kerjasama antar lembaga;

- b) menyusun rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan opini dan media komunikasi publik, pengelolaan dan integrasi sistem informasi, sumber daya komunikasi publik kerjasama antar lembaga;
 - c) menyelenggarakan informasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
 - d) menyelenggarakan pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media;
 - e) menyelenggarakan pembinaan jasa usaha komunikasi dan informasi dan kegiatan operasional usaha komunikasi;
- f. Seksi pengelolaan Opini dan Media Komunikasi Publik
- 1) Seksi Pengelolaan Opini dan Media Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi pengelolaan opini dan media komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah, serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah.
 - 2) Tugas Pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Opini dan Media Komunikasi Publik;
 - b) menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Opini dan Media Komunikasi Publik;
 - c) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan media sebagai mitra penyampaian informasi pembangunan daerah;

- d) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peliputan kegiatan pembangunan daerah oleh media mitra dan media umum;
- e) menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media massa dan sosial.

3) Seksi Pengelolaan dan Integrasi Sistem Informasi

- a) Seksi Pengelolaan dan Integrasi Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan integrasi sistem informasi.
- b) Tugas Pokok Kepala Seksi sebagaimana dimasud pada ayat (1) meliputi:
 - a) menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan dan Integrasi Sistem Informasi;
 - b) menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan dan Integrasi Sistem Informasi;
 - c) merumuskan kebijakan terkait fungsi layanan manajemen pengelolaan dan integrasi layanan publik dan pemerintahan di Kabupaten;
 - d) melaksanakan kebijakan terkait fungsi layanan manajemen pengelolaan dan integrasi layanan publik dan pemerintahan di Kabupaten;

- e) menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan terkait fungsi layanan manajemen pengelolaan dan integrasi layanan publik dan pemerintahan;
 - f) dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- g. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik dan Hubungan Kerja Sama Antar Lembaga
- 1) Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik dan Hubungan Kerja Sama Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya komunikasi publik dan hubungan kerja sama antar lembaga.
 - 2) Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan kemitraan komunikasi publik dan pengembangan hubungan kelembagaan media komunikasi publik;
 - b) menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik dan Hubungan Kerja Sama Antar Lembaga;
 - c) mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pengembangan kemitraan komunikasi publik dan pengembangan hubungan kelembagaan media komunikasi publik;
 - d) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi di bidang teknologi informasi komunikasi pada Perangkat Daerah;

- e) menyiapkan bahan, fasilitasi dan supervisi pembangunan dan pengembangan forum komunikasi antara media, asosiasi profesi, lembaga pemantau media/lembaga konsumen media serta unit pengelola informasi pemerintah daerah dan lembaga pemerintah pusat di daerah;
 - f) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan kemitraan komunikasi publik dan pengembangan hubungan kelembagaan media komunikasi publik;
- h. Bidang e-government
- 1) Bidang Penyelenggaraan E-Government dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan e-Government dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, keamanan informasi, layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pemeliharaan dan pengendalian infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
 - 2) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) perumusan kebijakan di bidang e-Government;
 - b) penyelenggaraan pelayanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
 - c) penyelenggaraan pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten dan layanan keamanan informasi e-Government;

- d) penyelenggaraan pelayanan manajemen data dan informasi e-Government;
 - e) penyelenggaraan pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
 - f) penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *Smart city*;
- i. Seksi Infrastruktur Jaringan dan Piranti Keras
- 1) Seksi Infrastruktur Jaringan dan Piranti Keras dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang e-Government dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten, layanan keamanan informasi e-Government di Kabupaten Sinjai.
 - 2) Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) menyusun rencana kegiatan Seksi Infrastruktur Jaringan dan Piranti Keras;
 - b) menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Infrastruktur Jaringan dan Piranti Keras;
 - c) menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan data center dan disaster recovery center;

- d) menyelenggarakan layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi e-Government;
 - e) menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika informasi komunikasi;
- j. Seksi Piranti Lunak dan Pengembangan aplikasi
- 1) Seksi Piranti Lunak dan Pengembangan Aplikasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang e-Government dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi Layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan di Kabupaten.
 - 2) Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) menyusun rencana kegiatan Seksi Piranti Lunak dan Pengembangan Aplikasi;
 - b) menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Piranti Lunak dan Pengembangan Aplikasi,
 - c) menyelenggarakan penetapan standar format data dan informasi;
 - d) menyelenggarakan layanan recovery data dan informasi;
 - e) menyelenggarakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;

- f) menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
 - g) menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
 - h) menyelenggarakan layanan interoperabilitas;
 - i) menyelenggarakan layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan Layanan Pusat Application Programm Interface daerah;
 - j) menyelenggarakan layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah;
- k. Seksi Tata kelola e-Government
- 1) Seksi Tata Kelola e-Government dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi layanan penyelenggaraan government chief information officer Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah Kabupaten dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten
 - 2) Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Kelola e-Government;

- b) menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Tata Kelola e-Government;
- c) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Tata Kelola e-Government;
- d) menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Kabupaten;
- e) menyelenggarakan layanan koordinasi kerja sama lintas Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
- f) merumuskan kebijakan terkait fungsi penyelenggaraan government chief information officer serta tata kelola dan pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah dan masyarakat di kabupaten;
- g) melaksanakan kebijakan terkait fungsi penyelenggaraan government chief information officer serta tata kelola dan pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah dan masyarakat di kabupaten;
- h) menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan terkait fungsi penyelenggaraan government chief information officer serta tata kelola dan pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah dan masyarakat di kabupaten;

1. Bidang persandian dan statistik

- 1) Bidang Persandian dan Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan persandian, statistik sektoral, pengawasan dan keamanan sistem informasi dan telekomunikasi.
- 2) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah;
 - b) perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan persandian;
 - c) pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah;
 - d) pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan persandian;
 - e) pengoordinasian kegiatan fungsional dalam penyelenggaraan statistik dan persandian.

c. Profil Desa Tongke Tongke

1. Sejarah Desa Tongke - Tongke

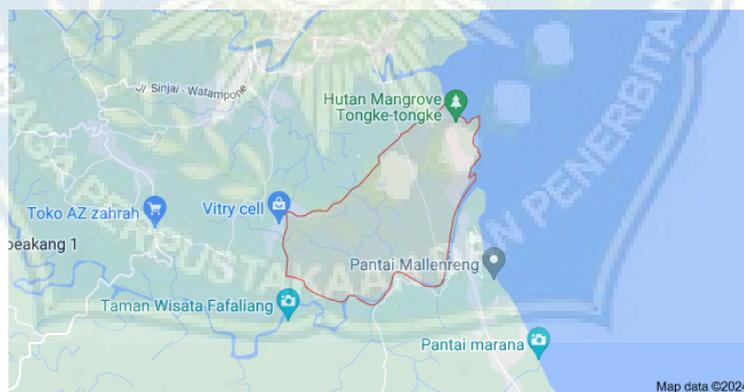
Desa Tongke-Tongke berada di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa ini dihuni oleh 2.169 penduduk laki-laki dan 2.154 penduduk perempuan. Tanah di desa ini sebagian besar terdiri dari lumpur berpasir dan memiliki kawasan hutan bakau yang telah dikembangkan menjadi destinasi pariwisata.

Desa Tongke-Tongke merupakan desa pesisir dengan luas sekitar 5-10 km² yang terletak di dekat Laut Flores. Secara geografis, desa ini berada

pada koordinat sekitar Garis Lintang Sekitar $5^{\circ}10'$ - $5^{\circ}12'$ Lintang Selatan, Garis Bujur Sekitar $120^{\circ}20'$ - $120^{\circ}22'$ Bujur Timur. Desa ini memiliki potensi besar dalam sektor perikanan dan pertanian, serta keunikan dengan hutan mangrove yang luas. Wilayahnya berbatasan dengan desa-desa lain dan laut, sehingga menjadikannya

lokasi strategis untuk berbagai kegiatan ekonomi dan konservasi.

Desa Tongke-Tongke berbatasan dengan, dibagian Utara: Desa Panaikang, Timur: Laut Flores, Selatan: Desa Biringere, dan Barat: Desa Kaloling. Desa ini memiliki topografi yang relatif datar dengan beberapa daerah yang sedikit bergelombang. Daerah pesisirnya didominasi oleh tambak dan hutan mangrove, sedangkan bagian lebih dalam digunakan untuk pertanian dan pemukiman.



Gambar 4.4 Peta desa tongke-tongke

Desa Tongke-Tongke terkenal sebagai salah satu produsen rumput laut terbesar di Kabupaten Sinjai. Selain rumput laut, desa ini juga menghasilkan komoditas utama lainnya seperti ikan dan udang dari

tambak. Pertanian juga memiliki peran signifikan, dengan tanaman utama meliputi padi, jagung, dan kelapa.

Sebagian besar penduduk Desa Tongke-Tongke bekerja sebagai petani, dan petambak. Selain itu, beberapa penduduk juga terlibat dalam sektor jasa dan perdagangan. Mayoritas penduduknya berasal dari suku Bugis dan menggunakan bahasa Bugis serta bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Desa ini tetap mempertahankan tradisi dan budaya Bugis dengan kuat. Adat istiadat, upacara adat, serta seni budaya seperti tari dan musik tradisional sering diselenggarakan dalam berbagai acara, termasuk pernikahan, panen raya, dan hari besar keagamaan.

2. Visi Misi Desa Tongke – Tongke

1) **Visi**

“Mewujudkan desa tongke-tongke yang mampu bersaing dan sejajar dengan desa lain dengan berfokus pada 4 (empat) bidang utama yaitu: Keagamaan, Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan”

2) **Misi**

A. Bidang Keagamaan.

1. Peningkatan pembangunan sarana ibadah, baik yang sedang dilakukan maupun yang belum direncanakan.

2. Peningkatan pembangunan sarana pondok pengajiandan majelis ta'lim dan memberikan santunan kepada anak yang berprestasi dibidang keagamaan.

B. Bidang Pemerintahan.

1. Peningkatan kedisiplinan terhadap aparat pemerintahan Desa.
2. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
3. Peningkatan kerja sama antara lembaga dan organisasi yang ada ditingkat Desa.

C. Bidang Pembangunan.

1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasanserta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.
2. Peningkatan pembanguna pada setiap wilayah dusun atau lingkungan.
3. Peningkatan sarana olahraga.

D. Bidang Kemasyarakatan

1. Penataan Lembaga organisasi kemasyarakatan tingklat Desa Tongke-Tongke.
2. Pembinaan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
3. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam secara optimal menciptakan pilar pendukungpada

pembangunan perekonomian melalui perkebunan, pertanian, perdagangan, koperasi dan budi daya rumput laut yang berbasis ekonomi kerakyatan.

d. Profil Desa Kampala

1. Sejarah Desa Kampala

Desa Kampala adalah desa yang terletak di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa ini berada di dataran tinggi dengan luas wilayah 14,61 km². Sebelum tahun 2005, Desa Kampala terdiri dari 6 dusun, tetapi setelah pemekaran, luas wilayahnya menjadi 6,09 km². Sebelum pemekaran, jumlah penduduk Desa Kampala mencapai 4.657 orang. Pada dekade kedua abad ke-21, jumlah penduduk rata-ratanya sekitar 2.600 jiwa. Lahan di Desa Kampala dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, dengan komoditas utama berupa padi, jagung, dan kacang tanah.

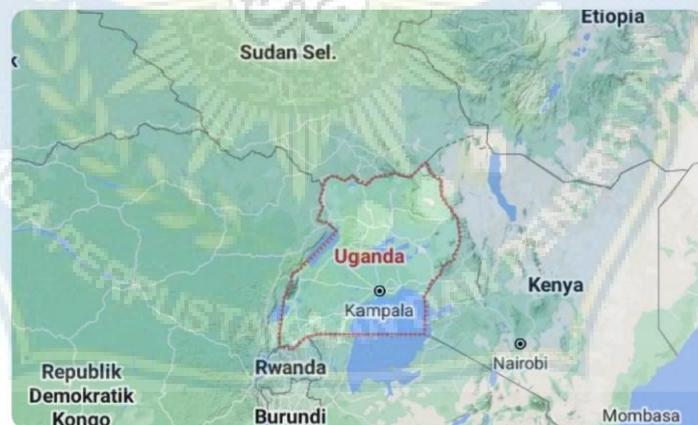
Desa Kampala berada di dataran tinggi. Wilayah Desa Kampala berada di ketinggian 700 mdpl di Kecamatan Sinjai Timur. Desa Kampala pada awalnya memiliki 6 dusun, yaitu Dusun Kampala, Dusun Salohe, Dusun Kolasa, Dusun Pao, Dusun Bongki, dan Dusun Lengkesa. Dusun ini masih termasuk wilayah Desa Kampala pada tahun 2005 sebelum pemekaran wilayah. Luas wilayah Desa Kampala sebelum pemekaran adalah 14,61 km². Pusat pemerintahannya sebelum pemekaran berada di Dusun Kampala.

Sebelum pemekaran wilayah, Desa Kampala berbatasan dengan Desa Saukang dan Desa Lamatti Riaja di bagian utara. Di bagian selatan, Desa Kampala berbatasan dengan Desa Bulu Kamase dan Desa Palae. Di bagian sebelah barat, Desa Kampala berbatasan dengan Desa Samaenre dan Desa

Mattunreng Tellue. Sedangkan di sebelah timur, Desa Kampala berbatasan dengan Desa Kaloling.

Wilayah Desa Kampala kemudian dimekarkan pada tahun 2005 dengan dua desa baru sebagai hasil pemekarannya. Kedua desa tersebut adalah Desa Salohe dan Desa Bongki Lengkesse. Desa Salohe dibentuk dari wilayah Dusun Salohe, Dusun Pakkita, dan Dusun Pattiro. Sementara Desa Bongki Lengkesse dibentuk dari Dusun Bongki, Dusun Lengkesse, dan Dusun Palae. Setelah dimekarkan, luas wilayah Desa Kampala berkurang menjadi 6,09 km². Sementara pusat pemerintahannya tetap berada di Dusun Kampala. Luas Desa Kampala ini sama dengan 8,47% dari luas Kecamatan Sinjai Timur secara keseluruhan.

Gambar 4.5 Peta Letak Desa Kampala



Desa ini memiliki lanskap yang beragam, meliputi area pertanian, perbukitan, dan lahan perkebunan. Letaknya yang strategis memberikan akses yang baik ke daerah sekitarnya dan pusat kecamatan. Kampala adalah desa dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, desa ini memiliki banyak peluang untuk berkembang,

terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Dukungan dari pemerintah dan kerjasama masyarakat sangat penting untuk memajukan desa ini ke arah yang lebih baik.

2. Visi dan Misi Desa Kampala

a) VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Kampalaini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal bahwa Desa Kampala merupakan salah satu Desa yang berada di Pulau Sembilan mempunyai titik sector kelautan, perikanan, dan Desa Kampalamerupakan daerah penghasil Ikan Laut maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Kampala adalah :

"Terwujudnya tata kelolah pemerintahan Desa Kampala yang baik dan bersih, guna mewujudkan kehidupan masyarakat Desa yang makmur dan sejahterah berdasarkan prinsip keadilan."

b) MISI

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya

visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Kampala, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Kampala adalah :

1. Meningkatkan profesionalisme system kinerja Aparatur Pemerintah Desa Kampala guna mewujudkan pelayanan masyarakat yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa Kampala secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kampala melalui pendampingan dan penyuluhan khusus kepada petani, peternak, wiraswasta dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa Kampala untuk memudahkan akses kehidupan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan dan kebudayaan masyarakat desa Kampala berdasarkan prinsip keislaman.e

B. Hasil Penelitian Tentang *Smart* Kampung

Smart kampung atau desa pintar, merupakan konsep yang menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan pembangunan pedesaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan. Ini melibatkan penerapan teknologi untuk meningkatkan

aksesibilitas, kualitas layanan, efisiensi sumber daya, dan memperbaiki infrastruktur di pedesaan.

Konsep *Smart* kampung bertujuan untuk menciptakan desa yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing melalui penerapan teknologi yang tepat dan partisipatif.

Dalam konsep Desa Cerdas, tingkat keberhasilan program diukur dengan melihat kinerja pengelolaan sumber daya sehingga menjadi lebih efisien, berkelanjutan dan melibatkan beragam elemen masyarakat. Konsep *Smart* Kampung dibutuhkan agar desa-desa mampu mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (*sensing*), memahami kondisi permasalahan desa (*understanding*), dan dapat mengatur (*controlling*) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganyasipasi aktif masyarakat.

1. Komunikasi

Komunikasi dalam pelayanan publik merujuk pada proses pertukaran informasi, gagasan, dan harapan antara pemerintah daerah dengan masyarakat, serta antar unit atau instansi pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada publik. Hal ini meliputi komunikasi antara pemerintah daerah dengan warga masyarakat, baik dalam hal pengumuman kebijakan, informasi terkait layanan publik, maupun tanggapan terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat.

Komunikasi dalam hal ini juga mencakup interaksi antar unit atau instansi pemerintahan dalam hal koordinasi, kolaborasi, dan penyebaran informasi yang

relevan untuk memastikan berjalannya berbagai program dan kegiatan pelayanan publik dengan lancar dan efisien. Pentingnya komunikasi adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, partisipasi aktif masyarakat, dan peningkatan kualitas layanan publik secara keseluruhan. Dengan komunikasi yang efektif, pemerintah daerah dapat lebih baik memahami kebutuhan dan harapan masyarakat serta meresponsnya secara tepat dan cepat. Seperti yang dikatakan kepala dinas kominfo terkait dalam pemberian edukasi/ bimtek mengenai “*Smart kampung*” terhadap aparat desa di kabupaten sinjai sebagai berikut:

“jadi program *Smart kampung* di kabupaten sinjai, dinas kominfo sebelum launching program ini, karena ini salah satu program unggulan dari pemerintah daerah sinjai, pak bupati pada periode sebelumnya yaitu pada periode andi seto asapa. Ini adalah program unggulan dan termasuk salah satu visi misi untuk program unggulannya. Nah dinas kominfo untuk mengsosialisasikan program *Smart kampung*, kita mengadakan bimtek, sepakat kita telah mengadakan bimtek terkait program *Smart kampung*. jadi dinas kominfo sudah pernah melaksanakan bimtek terkait 4 hal, yang pertama itu di ruang pola untuk sosialisasi bimtek, terus kedua kita pernah mengadakan bimtek di makassar mengundang semua pesertanya yaitu dari admin website desa di 80 desa dan kelurahan di kabupaten sinjai, jadi 76 desa dan 13 kelurahan jadi 80 desa itu semua sudah di bimtek. Terus kita juga disini membuka layanan untuk aplikasi termasuk website, jadi desa yang sudah membuat website jika masih terdapat kendala dalam pengelolaannya, bisa datang ke diskominfo untuk kita bantu bagaimana cara pengelolaannya, bagaimana membimbing untuk mengupdate websitenya (wawancara Bersama HF pada tanggal 5 april 2024).”

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dinas komunikasi informatika dan persandian kabupaten sinjai memiliki peran penting dalam pelaksanaan *Smart kampung*, dimana dinas komunikasi informatika dan persandian kabupaten sinjai merupakan tombak penggerak bagi setiap desa di kabupaten sinjai disini dinas komunikasi informatika dan persandian yang mengadakan bimtek terhadap aparat desa untuk mengetahui tata cara program

Smart kampung di kabupaten sinjai yang mana sudah beberapa kali diadakan pelatihan atau bimtek untuk memaksimalkan penerapan *Smart* kampung di setiap desa di kabupaten sinjai. Dan Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan kaur tata usaha dan umum menyatakan bahwa:

“Dalam program *Smart* kampung ini telah dilakukan bimtek beberapa kali, jadi admin desa termaksud saya telah mengelola *Smart* kampung dengan baik. Dan juga dalam pelayanannya telah dimaksimalkan tahun ini untuk penggunaan website desa tongke-tongke (wawancara bersama D pada tanggal 23 april 2024)



Gambar 4.6: Workshop Smart Kampung

Sumber: *Website Resmi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai*

Adapun penyediaan infrastruktur untuk di setiap desa dalam pelaksanaan program “*Smart* kampung” menurut kepala bidang APTIKA menyatakan bahwa:

“untuk infrastrukturnya, karna di dinas kominfo memang khususnya di bidang aptika, yang terdapat 3 seksi di bidang aptika itu ada seksi yang Namanya seksi penyedia penyelenggara infrastruktur, nah di infrastruktur

itu kita yang menyediakan infratraktur layanan internet ke Masyarakat. Desa bisa juga dibantu sama bakti, untuk jaringannya ada bakti, bantuan dari kominfo, terus untuk pengadaan alatnya itu infratraktur alatnya itu website di desa itu, desa sendiri yang menyediakan seperti antenanya kaya gitu, jadi nanti kominfo yang sediakan janringannya. Jadi dia pake dana abd desanya sendiri. Karna kalau termasuk disini akan menjadi beban lagi untuk anggarannya. Karna didesa juga ada abd anggarannya masing masing (wawancara bersama AY pada tanggal 8 april 2024)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang kominfo menyatakan bahwa terdapat bidang APTIKA yang mana didalamnya terdiri dari seksi penyedia penyelenggara infratraktur Dimana seksi ini bertugas dalam menyediakan infratraktur berupa layanan internet dan juga dinas komunikasi informatika dan persandian menyediakan jaringan di setiap desa dan untuk infratraktur berupa alat seperti antena dan lain-lain merupakan tanggung jawab bagi desa tersebut yaitu dari apbd masing-masing dari desa.

Dan juga adapun kualitas pelayanan publik dalam menerapkan *Smart* kampung di desa menurut sekretaris desa kampala:

“dengan adanya *Smart* kampung ini, dapat mempermudah pelayanan publik di Masyarakat khususnya di desa kampala ini. Karna dengan adanya *Smart* kampung pelayanan administrasinya bisa secara digital jadi biasanya Masyarakat atau warga yang ingin mengurus ktp harus kekota. Dari aspek utama ini misalnya, bisa kita minimalisir dengan cukup ke kantor desa saja, jadi dengan adanya layanan aplikasi yang ada di desa itu dalam waktu beberapa menit saja bisa selesai semua pengurusannya di desa (wawancara bersama A pada tanggal 19 april 2024)”.

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa kampala dapat dilihat bahwa dengan adanya program *Smart* kampung di kabupaten sinjai, dapat lebih mempermudah dalam hal pelayanan publik di desa, karna dengan adanya program ini pengurusan berkas Masyarakat desa dapat dilakukan di kantor desa saja, tanpa

perlu ke kantor pusat. Misalnya dalam hal pengurusan ktp, surat keterangan tidak mampu dan lain sebagainya, itu hanya perlu dilakukan secara digital kemudian di olah di kantor desa. Kemudian wawancara bersama Masyarakat setempat terhadap program *Smart* kampung di desa tongke tongke menyatakan bahwa:

“Sangat memudahkan saya, apabila saya ingin mengurus ktp saya, saya hanya perlu membukanya di hp, kemudian menyediakan berkas berkas seperti KK, dan saya tunggu respon dari kantor desa saja (wawancara bersama ibu DF pada tanggal 22 april).”

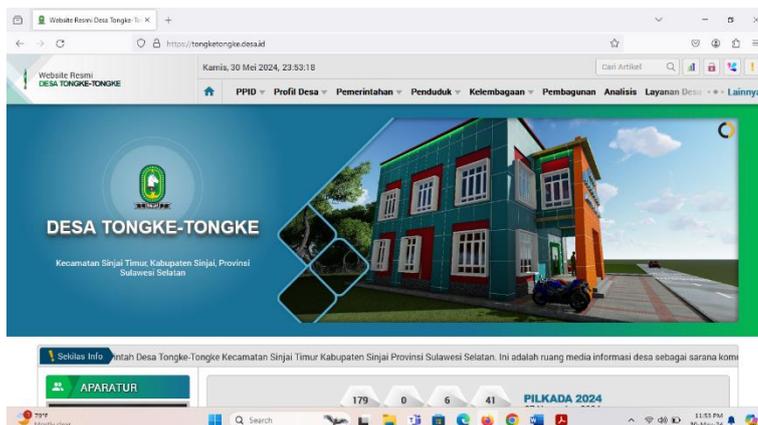
Kemudian wawancara bersama Masyarakat setempat di desa kampala juga mengatakan bahwa:

“Iya smart kampung ini sangat membantu Masyarakat terutama saya sendiri tetapi masih terdapat Masyarakat yang belum mengetahui program pemerintah ini (wawancara bersama ibu N pada tanggal 25 april).”

Selain itu terdapat bentuk-bentuk pelayanan publik yang dapat dilakukan dalam penerapan *Smart* kampung dikabupaten sinjai:

“termasuk website, layanan administrasi desa, layanan mandiri. Jadi warga sendiri yang tek tek tek di dalam anjungannya hingga bisa mengelola layanan ktp untuk dapat termentansi suatu surat keterangan dari kantor desa, dia sendiri yang sisa ada nipnya nanti diarahkan di sana ada aminya”. (Menurut AY kepala bidang APTIKA DISKOMINFO Kab. Sinjai)

Gambar 4.7: website desa tongke-tongke



Sumber: website resmi desa tongke-tongke

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia serta mendukung kehidupan dan kesejahteraan. Pengelolaan sumber daya ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat diberikan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, penganggaran, pelatihan, dan pengawasan untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan dengan optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara untuk penerapan dan pelaksanaan *Smart* kampung di Kabupaten Sinjai sendiri, sumber daya manusia diawasi dan ditinjau oleh pihak Dinas komunikasi informatika dan persandian Kabupaten Sinjai. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Kepala Dinas diskominfo Kab, Sinjai yakni:

“Pastinya kita yang monitoring karna kita setiap bulan itu kita evaluasi yang mana kita bentuk ada grub whatsapp. jadi admin desa yang, misalnya dalam mengelola website desa terkendala bisa komunikasi di whatsapp serta langsung berikan Solusi (wawancara bersama HF pada tanggal 5 april 2024).”

Sementara apabila terdapat kendala dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada program *Smart* kampung, hal tersebut biasanya di timbulkan oleh admin pengelola website *Smart* kampung yang mana di setiap desa terdapat 1 sampai 2 orang admin desa smart kampung di setiap daerah yang menerapkan program tersebut, sehingga untuk mengatasi kendala tersebut biasanya admin menyampaikan kendala apa yang dialami pada grup whatsapp

yang telah dibentuk. Seperti yang disampaikan oleh kepala dinas diskominfo bahwa:

“apabila masalah SDM di desa itu tergantung dari admin desanya masing masing. Karna dengan adanya program ini desa semakin antusias untuk memberikan, mengarahkan stafnya untuk datang ke kominfo untuk dapatkan edukasi tentang bagaimana mengelolah websitenya bagaimana membuat aplikasi yang memudahkan warganya untuk pelayanan publiknya (wawancara bersama HF pada tanggal 5 april 2024)”.

Kemudian didukung oleh pendapat AY seksi pengelola website dan informatika yang menyatakan bahwa:

“iya karna kita sudah melakukan pembimbingan disini, diselenggarakan bimtek beberapa kali. Jadi adminya dikatakan itu sudah mahir untuk mengelola layanan itu (wawancara bersama AY pada tanggal 8 april 2024)”.

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa setiap kendala dalam pelaksanaan maupun kendala yang berhubungan dengan SDM pada program *Smart kampung* ditanggung oleh setiap admin pengelola website di desa masing-masing. Sementara untuk Solusi dari kendala tersebut dapat disampaikan pada pengelola website di dinas Kominfo secara langsung. Sehingga dapat dikatakan untuk sumber daya pada program ini secara langsung di kelola secara langsung oleh dinas komunikasi dan informatika dan persandian daerah setempat.

3. Deposisi atau Respon

Respon bisa diartikan sebagai tanggapan. Rafikayuni dkk (2017:3) dalam penelitiannya mengatakan respon adalah suatu rangsangan yang terjadi dan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sikap. Menurut Wijayanti (2015:182) respon adalah hasil dari perilaku stimulasi yaitu aktivitas dari orang yang bersangkutan,

terlepas dari apakah stimulus tersebut bisa diamati atau tidak. Sedangkan menurut Khariyah (2019: 199) respon adalah kesan atau tanggapan setelah seseorang mengamati melalui aktifitas pengindraan sehingga terbentuknya sikap positif ataupun negative.

Pada penelitian ini terdapat beberapa responden untuk mengetahui *Smart* kampung yang di terapkan pada daerah masing-masing. Sehingga pada penelitian ini peneliti mengangkat sebanyak 5 responden yang terdiri dari pranata computer ahli muda Diskominfo, Kaur tata usaha dan umum desa tongke-tongke dan Sekretaris desa kampala, serta Masyarakat sebanyak 2 orang.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama kaur tata usaha dan umum tongke-tongke mengenai pemerintah yang mendukung secara penuh program *Smart* kampung ini diterapkan di desa tongke-tongke. Berikut adalah hasil wawancara tersebut:

“kalau untuk program *Smart* kampung ini pasti pemerintah mendukung penuh karna ini adalah salah satu program unggulan dari pemerintah kabupaten sinjai untuk periode bupati kemarin 2018-2023 dan itu masi terus berlanjut sampai sekarang. jadi dari dukungannya dari dukungan anggaran (wawancara bersama D pada tanggal 23 april 2024).”

Tabel 4.1 Program Unggulan Kabupaten Sinjai 2024.

No	Bidang	Program Unggulan
1	Kesehatan	program pelayanan kesehatan dan pencapaian Universal Health Coverage (UHC)
2	Pendidikan	bantuan sarana dan beasiswa Pendidikan.
3	Lingkungan	Sinjai Go Green.

4	Lingkungan	Perdagangan Karbon (Carbon trade.
5	Teknologi Informasi	Smart Kampung.

Sumber: Website Resmi Kabupaten Sinjai

Berdasarkan pendapat diatas diketahui bahwa program *Smart* kampung didukung secara penuh oleh pemerintahan kabupaten Sinjai karena merupakan salah satu program unggulan dari beberapa periode yakni dari 2019 hingga saat ini, masih beroperasi dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan program *Smart* kampung merupakan salah satu program yang patut untuk dipertahankan dan memiliki dampak yang baik serta sangat membantu masyarakat dalam pelayanan masyarakat. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh kaur tata usaha dan umum tongke tongke bahwa:

“Program *Smart* kampung ini sangat sangat membatu sekali dan ini sangat memudahkan pelayanan Masyarakat (wawancara bersama D pada tanggal 23 april).”

Selain itu program ini merupakan salah satu program yang unik karena dapat dianggap sebagai jawaban untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam menghadapi era revolusi Industri 4.0. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di mana pelayanan hendaknya memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan kepada masyarakat. Dari data desa tongke-tongke terdapat total pengunjung pada website adalah 365.572 pengunjung dari tahun 2019 hingga sekarang ini. Pada pelayanan berbasis *Smart* kampung, kualitas pelayanan diukur menggunakan dimensi *eGovernment Quality (e-GovQual)* yang diadopsi dari

Papadomichelaki & Mentzas (2012) meliputi *efficiency* (efisiensi), *trust* (kepercayaan), *reliability* (kehandalan), dan *citizen support* (pendukung). Berbeda dengan standar kualitas layanan lainnya yang biasanya menggunakan metode *servqual* dan berfokus pada website internal di bidang pemasaran dan jasa.

Menurut sekretaris kampala bahwa:

“pelayanan publik dengan model *Smart* kampung ini lebih menarik dibandingkan dengan pelayanan publik pada umumnya karena merupakan salah satu program yang di adopsi dari luar dan kita coba kembangkan disini, sdm di kabupaten sinjai mencoba mengembangkan itu, dan ini cukup menarik karna ini emang betul betul salah satu jembatan hasil fasilitasi untuk dalam hal birokrasi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah, jadi memudahkan jadi tdk perlu harus datang kekota lagi (wawancara bersama A pada tanggal 19 april 2024).”

Akan tetapi, meskipun *Smart* kampung merupakan program yang bisa dipertahankan, program ini masih memiliki kelamahan di bidang infrastruktur, seperti yang diungkapkan oleh kepala dinas kominfo yaitu:

“kelemahannya mungkin dari segi infrastrukturnya perlu dibenahi sedikit tapi, meskipun belum maksimal yaa sudah ada, sdm di desa juga belum siap, selain itu keterbatasan anggaran dana desa di setiap desa kan beda beda anggarannya (wawancara bersama HF pada tanggal 5 april 2024).”

Dari beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa selain memiliki keuntungan, program ini juga memiliki kelamahan selama di terapkan di kabupaten Sinjai. Kemudian, menurut peneliti respon ataupun deposisi dalam suatu program sangat dibutuhkan untuk dijadikan sebagai referensi maupun sarana untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan maupun kendala yang terjadi selama program ini diterapkan.

4. Birokrasi

Birokrasi sangat menunjang terealisasi dan terlaksananya kebijakan yang ada. Tanpa struktur birokrasi yang jelas maka implementor atau pelaksana kebijakan akan kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan yang ada, walaupun sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersedia dan juga para implementor atau pelaksana kebijakan memiliki atusiasme dan kemampuan yang mumpuni dalam melaksanakan kebijakan, hal ini akan tetap sulit terlaksana dengan baik. Menurut Edward C III, sebagai pelaksana dalam suatu kebijakan, birokrasi harus bisa mendukung secara penuh atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan melalui koordinasi yang baik. Terdapat dua (2) karakteristik yang bisa memacu kinerja dari struktur birokrasi atau organisasi, yaitu: melakukan SOP (Standart Operasional Prosedur) dengan baik dan melaksanakan fregmentasi. Pada penerapan implementasi kebijakan *Smart* kampung ini, SOP (Standart Operasional Prosedur) khususnya di bidang pelayanan dalam *Smart* kampung, sudah terlaksana dengan baik di desa-desa. Salah satunya adalah SOP yang ada di desa Tongke-Tongke dan Kampala.

Sedangkan pada pelaksanaan fragmentasinya, hasil observasi dan wawancara melihat bahwa penyebaran tanggung jawab aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan pegawai pada beberapa unit kerja, sedari awal perencanaan kebijakan *Smart* kampung ini telah terlaksana dengan baik dan rapi.

Menurut kaur tata usaha dan umum Tongke-Tongke bahwa:

“untuk program *Smart* kampung di sinjai ini kan sudah berjalan mulai tahun 2019, dan ini sudah dianggap suplemen suplemen penting dan berapa desa juga sudah tinggal 10% desa yang belum membuat website dan selebihnya sudah ada website dan layanannya juga sudah berjalan dengan baik, meskipun belum tuntas masih terus berlanjut untuk

pembenahan bagi desa yang belum lengkap ataupun sebagainya (wawancara bersama D pada tanggal 23 april 2024).”

Hal ini juga didukung oleh pendapat yang disampaikan oleh sekretaris desa Kampala bahwa:

“*Smart* kampung intinya adalah *Smart* kampung merupakan suatu modifikasi hasil pelayanan yang mempermudah dan mempercepat pelayanan terhadap Masyarakat desa. Dimana sektor utama *Smart kampung* adalah diskominfo. Jadi diskominfo yang memprogram kemudian menyediakan aplikasi desa. Banyak aplikasi yang mendukung terjadinya *Smart kampung* salah satunya adalah aplikasi production. Aplikasi ini merupakan salah satu bentuk aplikasi yang merangkum semua data penduduk. Kedua aplikasi pelayanan publik yaitu didalamnya terdapat format persuratan yang sudah ditetapkan, yang kemudian sisa disini (wawancara bersama A pada tanggal 19 april 2024).”

Bagian dinas kominfo kabupaten Sinjai yang mengeluarkan perbup *Smart* kampung, kecamatan sebagai penanggung jawab dan koordinator desa-desa di wilayahnya, kemudian desa memiliki tanggung jawab pelaksanaan *Smart* kampung langsung ke masyarakat dan juga menempatkan staf desanya ke dalam bidang-bidang yang dinilai sesuai dengan kemampuan mereka. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan fragmentasi yang dilakukan dalam rangka penyebaran tanggung jawab aktivitas-aktivitas atau kegiatan pegawai pada beberapa unit kerja dalam implementasi kebijakan *Smart* kampung ini telah berjalan dengan baik. Baik itu di level kabupaten maupun di level desa, sehingga Implementasi kebijakan *Smart* kampung dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga saat ini. Menurut sekretaris desa Kampala menyatakan bahwa:

“jadi peran diskominfo itu selain penyedia infrastruktur jaringannya terus SDM untuk membimbing menerapkan pepembimbingan pada admin desa untuk mengelola website desa (wawancara bersama A pada tanggal 19 april 2024).”

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa *Smart* kampung di Kabupaten Sinjai yang sudah berjalan sejak Tahun 2019 dan dilaunching secara resmi pada tahun 2021. Instansi penanggung jawab dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai telah melakukan pelatihan, bimbingan serta pendampingan dalam pembuatan dan pengelolaan website desa.id bagi 67 desa dan 13 kelurahan yang ada di Kabupaten Sinjai. Program *Smart* kampung dilaksanakan berdasarkan RPJMD kabupaten Sinjai dan visi misi pemerintah Kabupaten Sinjai sedangkan belum ada Peraturan Bupati yang mendasari pelaksanaan program ini, seharusnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati agar pelaksanaannya dapat lebih terarah dan efektif Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Digital *Smart* Kampung di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai sudah cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan menganalisis isi kebijakan dan konteks kebijakan.

Tabel 4.2 Rekap status website desa dan kelurahan kabupaten sinjai
(Rekapan lengkap semua desa terdapat pada halaman lampiran hal 96)

Tidak ada website	9
Websute aktif	56
Website non aktif	15
total	80

Sumber data: Dinas Komunikasi, Informatika Dan Komunikasi Kabupaten Sinjai 2024

C. Pembahasan Penelitian

Pada bagian ini , terdapat penjelasan topik yang sesuai dengan temuan peneliti, sehingga pada pembahasan ini, peneliti akan menggabungkan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Hal ini

sejalan dengan metode analisis kualitatif deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Identifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan yang diinginkan. Adapun pembahasan terkait implementasi *Smart* kampung dinas komunikasi, informatika dan persandian dalam meningkatkan pelayanan publik di kabupaten sinjai berdasarkan indikator yang diteliti oleh peneliti yaitu:

1. Komunikasi

Teori komunikasi menekankan penggunaan komunikasi untuk memfasilitasi perubahan sosial dan pembangunan, terutama di negara-negara berkembang. Smart Kampung merupakan salah satu bentuk program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui teknologi dan informasi yang mana hal ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga komunikasi yang digunakan harus bersifat dua arah dan memberdayakan masyarakat untuk mengambil bagian dalam perubahan.

Communication (komunikasi), dalam pengimplementasian suatu kebijakan sangatlah penting karena berkenaan langsung dengan publik dan organisasi. (Simon & Alouini, 2004) menyatakan Komunikasi adalah proses berbagi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas komunikasi tersebut dan juga merupakan elemen esensial dalam kehidupan kita, karena kita semua berinteraksi satu sama lain melalui komunikasi.

Di kabupaten Sinjai sendiri sejak awal pengimplementasian kebijakan *Smart* kampung ini komunikasi telah dilakukan dengan baik. Diskominfo sebagai

koordinator pelaksanaan kebijakan *Smart* kampung yang mengkomunikasikan berbagai persiapan dalam penyusunan kebijakan *Smart* kampung. Komunikasi yang dibangun oleh diskominfo berjalan baik dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Sinjai.

Komunikasi yang harus dilakukan pun tidak hanya dengan OPD yang ada di Sinjai, namun juga melibatkan stake holder yang ada seperti PT PLN dan PT Telkom. Komunikasi yang dijalin dengan baik sejak awal tentunya memudahkan dalam implementasi kebijakan *Smart* kampung dan berjalan dengan baik hingga saat ini.

Smart kampung di Kabupaten Sinjai sudah berjalan sejak Tahun 2019 dan dilaunching secara resmi pada tahun 2021. Instansi penanggungjawab dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai telah melakukan pelatihan, bimbingan serta pendampingan dalam pembuatan dan pengelolaan website desa.id bagi 67 desa yang ada di Kabupaten Sinjai. Program *Smart* kampung dilaksanakan berdasarkan RPJMD kabupaten Sinjai dan visi misi pemerintah Kabupaten Sinjai sedangkan belum ada Peraturan Bupati yang mendasari pelaksanaan program ini, seharusnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati agar pelaksanaannya dapat lebih terarah dan efektif.

2. Sumber daya

Teori sumber daya berfokus pada bagaimana organisasi, termasuk pemerintah desa, menggunakan dan mengelola sumber daya mereka untuk mencapai keunggulan kompetitif dan keberhasilan program.

Dalam melaksanakan suatu kebijakan terdapat sumber daya yang digunakan untuk dapat menjalankan sebuah kebijakan. Kebutuhan sumber daya yang mendukung pelaksanaan suatu program merupakan hal yang utama karena dapat memberikan dampak dalam mencapai tujuan kinerja yang efektif dan efisien. Menurut (Rismawati et al., 2020) sumber daya adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan tertentu, termasuk bahan, energi, waktu, dan kemampuan manusia. Dalam implementasi program pelayanan *Smart* kampung ini terdapat sumber daya manusia dan sarana prasarana yang telah mendukung proses penyelenggaraan program *Smart* kampung di Kabupaten Sinjai.

Resources (sumber daya), menurut George C.E III sumber daya merupakan hal yang sangat penting, karena sebagai apapun kebijakan yang di bentuk akan sia-sia dan hanya akan menjadi rencana saja jika tidak ada sumber daya manusia atau sumber daya pendukung untuk menjalankan kebijakan tersebut. George C. Edward III juga menyatakan bahwasanya jika para implementor atau pelaksana kebijakan kekurangan sumber-sumber yang digunakan dalam menjalankan suatu kebijakan, maka kebijakan tersebut akan kurang efektif dalam penerapannya. Meskipun dalam penerapannya telah dilakukan komunikasi yang jelas, akurat dan konsisten Sumberdaya (staf) pelaksana pada kebijakan *Smart* kampung telah terbentuk secara baik. Setiap OPD memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Setiap OPD memiliki tim-tim pelaksana pada kebijakan *Smart* kampung, sehingga pelaksanaan implementasi *Smart* kampung tidak tumpang tindih dan sesuai dengan tupoksi yang akan dijalankannya.

Sumber daya manusia merujuk pada tenaga kerja yang dimiliki oleh suatu organisasi atau komunitas, termasuk keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang dimiliki oleh individu-individu dalam masyarakat. Pelatihan dan pengembangan keterampilan digital bagi staf desa adalah kunci dalam implementasi Smart Kampung. Tanpa keterampilan yang memadai, teknologi yang diterapkan mungkin tidak dapat digunakan secara optimal. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan menjadi penting untuk memastikan bahwa di setiap desa dapat berpartisipasi aktif dalam program ini.

Tidak hanya sumber daya manusia (staf) pelaksana pada OPD, sumber daya manusia (staf) pelaksana juga ada di level kecamatan dan juga di desa-desa seluruh Kabupaten Sinjai. Setiap kecamatan minimal ada 3 staf pelaksana yang menangani hal-hal terkait dengan *Smart* kampung. Sedangkan di desa-desa diharuskan minimal ada juga 2 staf pelaksana, sebagai operator yang bisa mengoperasikan dan mengerti sistem *Smart* kampung yang telah di instal di desa-desa di seluruh kabupaten Sinjai. Pada variabel sumber daya manusia (staf) pelaksana kebijakan implementasi *Smart* kampung telah mencukupi dan terkelola dengan baik hingga ke level-level desa sehingga pelaksanaan implementasi kebijakan *Smart* kampung dapat berjalan dengan baik hingga saat ini.

3. Disposisi atau Respon

Teori disposisi atau respon menjelaskan bagaimana keyakinan, perasaan, dan kecenderungan perilaku seseorang terhadap suatu objek, orang, atau peristiwa mempengaruhi respons mereka. Sikap masyarakat desa terhadap teknologi dan inovasi yang dibawa oleh Smart Kampung sangat menentukan keberhasilan

implementasi. Jika masyarakat memiliki sikap positif (misalnya, percaya bahwa teknologi akan meningkatkan kualitas hidup mereka), mereka lebih mungkin mendukung dan menggunakan layanan Smart Kampung. Sebaliknya, sikap negatif dapat menyebabkan resistensi terhadap perubahan.

Disposisi atau respon masyarakat terhadap penggunaan teknologi dalam Smart Kampung dipengaruhi oleh seberapa besar mereka merasa teknologi tersebut bermanfaat dan mudah digunakan. Program pelatihan dan edukasi dapat membantu meningkatkan persepsi positif ini, sehingga masyarakat lebih siap dan bersedia menerima teknologi baru.

Tingkat kepatuhan dan respon pelaksana kebijakan merupakan bentuk dukungan yang berpengaruh dalam suatu implementasi program. Disposisi atau respon menurut (Herlina, 2013) dapat diartikan sebagai sikap, kecenderungan, atau sifat alami seseorang dalam merespon situasi tertentu. Ini mencakup bagaimana seseorang biasanya berpikir, merasa, dan bertindak dalam berbagai situasi. Misalnya, seseorang dengan disposisi yang ramah cenderung bersikap hangat dan bersahabat kepada orang lain. Disposisi juga sering digunakan dalam konteks psikologi untuk menggambarkan kecenderungan perilaku yang konsisten sepanjang waktu dan dalam berbagai keadaan.

Merile S. Grindle mengemukakan bahwa indikator terakhir dalam dimensi konteks kebijakan ini juga di tentukan oleh sejauh mana kepatuhan dan respon pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Dari hasil observasi peneliti pada dinas Komunikas Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai menunjukkan kepatuhan serta daya tanggap pihak Dinas Komunikasi Informatika dan

Persandian Kabupaten Sinjai sudah cukup baik. Berbeda dengan pegawai pemerintahan desa yang masih kurang disiplin dalam menjalankan tugasnya, kedisiplinan menjadi faktor utama dalam keberhasilan suatu program juga konsistensi dalam melaksanakan program ini.

Edward III menyatakan bahwa sikap yang positif dan baik dari para pelaksana terhadap suatu kebijakan menandakan mereka memberikan suatu dukungan yang mendorong mereka bisa menunaikan kewajiban dengan baik dan juga sesuai dengan keinginan para pembuat kebijakan. Demikian sebaliknya, jika perspektif atau perilaku para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses implementasi suatu kebijakan akan menjadi sulit. Implementasi kebijakan bisa berhasil jika dilakukan manajemen disposisi yang baik.

Disposisi merupakan variable ke tiga (3) yang juga sangat penting perannya dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi ketersediaan dari bawahan atau implementator dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan sangatlah penting. Komintan dari pada implementator sangat penting disamping juga kecakapan dan skill dalam pelaksanaannya. Beberapa hal penting yang harus dicermati pada variabel disposisi adalah terkait dengan pengangkatan birokrat, pemberlakuan insentif dan efek daipada disposisi itu sendiri. Pemilihan dan pengangkatan personil yang akan melaksanakan kebijakan haruslah tepat. Pengangkatan yang dilakukan haruslah pada orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi kepada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan, supaya bisa mengawalinya dengan baik. Jika tidak melakukan pengangkatan pada orang-orang yang berkompeten dan memiliki dedikasi tinggi

atau melakukan pengangkatan dengan tidak berdasarkan kompetensi yang dimiliki, maka di khawatirkan akan terjadi in sub koordinasi (perlawanan) kepada pejabat tinggi di atasnya atau terjadinya hambatan-hambatan nyata terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Pengangkatan birokrat pada implementasi kebijakan *Smart kampung* sudah sesuai.

Terbukti dengan para Kepala OPD melakukan pemilihan dan pengangkatan personil yang akan melaksanakan kebijakan adalah orang tepat dan sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya. Mereka juga orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi kepada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Hal yang perlu dicermati berikutnya dalam disposisi adalah pemberian insentif. Dari hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan di dua desa yang ada di Kabupaten Sinjai yaitu di kepala desa tongke-tongke dan desa Kampala, didapatkan informasi bawasanya insentif adalah hal yang sangat penting dalam mendukung suksesnya kebijakan *Smart kampung*, karena dengan insentif itulah para staf pelaksana (operator) sistem *Smart kampung* bisa mendapatkan motivasi tambahan atau bisa mendapatkan semangat yang lebih sehingga mereka lebih bisa menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik. Insentif tersebut diberikan setiap bulannya kepada para operator tersebut. Insentif yang diberikan di ambil dari anggaran yang ada di Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemberian insentif pada Implementasi Kebijakan *Smart kampung* ini sudah berjalan sampai saat ini.

Jika implemendor atau pegawai tidak melaksanakan disposisi atau sikap pelaksana dengan baik atas apa yang di perintahkan oleh atasannya, maka barang

tentu akan menjadikan masalah dan hambatan-hambatan nyata bagi implementasi kebijakan. Karena itu pengangkatan dan pemilihan terhadap implemendor atau pelaksana kebijakan

4. Birokrasi

Implementasi Smart Kampung memerlukan struktur birokrasi yang jelas untuk mengelola proyek secara efektif. Ini termasuk pembuatan aturan dan prosedur untuk penggunaan teknologi, pembagian tanggung jawab, dan pengawasan. Struktur yang baik akan memastikan bahwa setiap aspek program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi, dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Max Weber mengembangkan teori birokrasi yang menekankan struktur organisasi yang rasional, sistematis, dan hierarkis. Ciri-ciri utama birokrasi menurut Weber meliputi pembagian kerja yang jelas, aturan dan prosedur standar, serta struktur hierarki yang jelas.

Pelaksanaan kebijakan tidak pernah lepas dari pengaruh kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, baik pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan hingga pihak diluar kebijakan baik itu langsung maupun tidak langsung. Menurut (Risnawan, 2017) birokrasi adalah sistem administrasi yang mengatur organisasi, biasanya dalam pemerintahan atau perusahaan besar, dengan aturan, prosedur, dan hierarki yang ketat. Sistem ini bertujuan untuk memastikan efisiensi, konsistensi, dan keadilan dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan tugas. Birokrasi sering melibatkan

pembagian tugas yang jelas, dokumentasi yang terperinci, dan rantai komando yang formal.

Indikator dari konteks kebijakan yaitu kepuasan, kepentingan, dan strategi pihak yang terlibat. Maksud dari hal ini adalah kewenangan yang dimiliki oleh Diskominfo dalam implementasi program *Smart* Kampung serta strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari program ini. Aktor utama atau pihak yang berpengaruh dalam pelaksanaan program *smart* kampung ini adalah Kepala Dinas Diskominfo namun untuk menjalankan program ini terdapat aktor lain yang berpengaruh dalam menjalankan program ini yaitu Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Diskominfo dan Kepala Seksi E-Government dan aparatur pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Pada suatu implementasi program, siapa yang menjadi pelaksana program akan menjadi penentu dari terciptanya tujuan dari suatu program, Suatu program dapat berhasil apabila birokrasi yang dijalankan sesuai dengan pembagian tugas yang jelas serta kepatuhan dari pelaksana program. Pelaksana program yang utama dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian serta seluruh perangkat desa yang ada di Kabupaten Sinjai.

Struktur birokrasi sangat menunjang terealisasi dan terlaksananya kebijakan yang ada. Tanpa struktur birokrasi yang jelas maka implementor atau pelaksana kebijakan akan kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan yang ada, walaupun sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersedia dan juga para implementor atau pelaksana kebijakan memiliki atusiasme dan kemampuan yang mumpuni dalam melaksanakan kebijakan, hal ini akan tetap sulit terlaksana

dengan baik. Menurut Edward C III, sebagai pelaksana dalam suatu kebijakan, birokrasi harus bisa mendukung secara penuh atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan melalui koordinasi yang baik. Terdapat dua (2) karakteristik yang bisa memacu kinerja dari struktur birokrasi atau organisasi, yaitu: melakukan SOP (Standart Operasional Prosedur) dengan baik dan melaksanakan fregmentasi. Pada penerapan implementasi kebijakan *Smart kampung* ini, SOP (Standart Operasional Prosedur) khususnya di bidang pelayanan dalam *Smart* desa, sudah terlaksana dengan baik di desa-desa. Salah satunya adalah SOP yang ada di desa Tongke-Tongke dan Kampala.

Sedangkan pada pelaksanaan fragmentasinya, hasil observasi dan wawancara melihat bahwa penyebaran tanggung jawab aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan pegawai pada beberapa unit kerja, sedari awal perencanaan kebijakan *Smart* kampung ini telah terlaksana dengan baik dan rapi. Dari awal Bupati telah melimpahkan kewenangannya kepada Bappeda Kabupaten Sinjai sebagai koordinator pelaksana kebijakan *Smart* kampung dan bisa membagi tanggung jawab kepada setiap OPD teknis untuk melaksanakan kebijakan *Smart* kampung ini dengan baik. Dinas PMD sebagai OPD yang mengani terkait aparatur desa, Dinas Kominfo sebagai OPD yang menangani terkait sistem dan juga jaringan *Smart* kampung, Diskominfo yang mengeluarkan perbub *Smart* kampung, kecamatan sebagai penanggung jawab dan koordinator desa-desa di wilayahnya, kemudian desa memiliki tanggung jawab pelaksanaan *Smart* kampung langsung ke masyarakat dan juga menempatkan staf desanya ke dalam bidang-bidang yang dinilai sesuai dengan kemampuan mereka. Sehingga dapat

ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan fragmentasi yang dilakukan dalam rangka penyebaran tanggung jawab aktivitas-aktivitas atau kegiatan pegawai pada beberapa unit kerja dalam implementasi kebijakan *Smart* kampung ini telah berjalan dengan baik. Baik itu di level kabupaten maupun di level desa, sehingga Implementasi kebijakan *Smart* kampung dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga saat ini.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan analisa wawancara yang penulis lakukan mengenai Implementasi *Smart* kampung dinas komunikasi informatika dan persandian dalam meningkatkan pelayanan publik di kabupaten sinjai terdapat beberapa temuan yang dapat disimpulkan.

1. Komunikasi: Diskominfo memiliki peran penting dalam pelaksanaan *Smart* Kampung, dimana merupakan tombak penggerak bagi setiap desa dalam melakukan atau mengadakan bimtek terhadap aparat desa untuk mengetahui tata cara program *Smart* kampung yang mana sudah beberapa kali diadakan pelatihan atau bimtek untuk memaksimalkan penerapa *Smart* kampung di setiap desa di kabupaten sinjai.
2. Sumber Daya Manusia (SDM): pelaksana mencukupi dan memadahi, Informasi yang diterima oleh staf atau admin desa, tersampaikan dengan baik dimana telah melakukan pelatihan atau bimtek beberapa kali kepada setiap staf atau admin desa di setiap desa di kabupaten sinjai jadi dapat dikatakan staf atau admin desa sudah mampu atau mahir mengelola program *Smart* kampung berupa website desa yang telah di buat di setiap desa di kabupaten sinjai.
3. Disposisi atau respon: dengan diterapkannya program *Smart* kampung ini merupakan salah satu program yang unik karena dapat dianggap sebagai

jawaban untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang dapat memberikan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan terhadap Masyarakat desa terutama dalam pelayanan publik. Akan tetapi selain memiliki keuntungan, program ini juga memiliki kelemahan selama di terapkan yaitu dari infrastruktur yang masih kurang.

4. Birokrasi: *Smart* kampung yang sudah berjalan sejak Tahun 2019 dan dilaunching secara resmi pada tahun 2021. Instansi penanggung jawab dalam hal ini telah melakukan pelatihan, bimbingan serta pendampingan dalam pembuatan dan pengelolaan website desa.id bagi 80 desa yang ada di Kabupaten Sinjai. Program *Smart* kampung dilaksanakan berdasarkan RPJMD dan visi misi pemerintah Kabupaten Sinjai.

B. SARAN

Untuk meningkatkan Implementasi *Smart* kampung dinas komunikasi informatika dan persandian dalam meningkatkan pelayanan publik di kabupaten sinjai, beberapa saran yang penulis dapat kemukakan.

1. Diskominfo Kab. Sinjai agar bisa melaksanakan kegiatan monitoring dan pendataan jaringan website di desa-desa yang ada pada kabupaten sinjai yang dilakukan secara langsung oleh tim yang telah dibentuk. Monitoring dan pendataan dilakukan untuk melihat kendala dan permasalahan yang dialami oleh pemerintah desa dalam menjalankan program pelayanan publik berbasis digital *Smart* kampung
2. Aparatur desa Tongke-tongke dan Kampala, agar dapat melakukan sosialisasi kepada seluruh kepala desa melalui via daring atau lewat zoom meeting agar

masyarakat paham akan pentingnya program *Smart* kampung sehingga dapat menjadi hal pendukung agar semua pihak dapat menjalankan program ini semaksimal mungkin

3. Bagi Peneliti selanjutnya agar dapat menjadikan judul penelitian sebagai referensi untuk judul penelitian berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adamowicz, M., & Zwolinska-Ligaj, M. (2020). The “smart village” as away to achieve sustainable development in Rural Areas of Poland. *Sustainability (Switzerland)*, 12(16). <https://doi.org/10.3390/su12166503>
- Agung Saputra, M., & Rahman Isnain, A. (2021). Penerapan Smart Village Dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat Menggunakan Metode Web Engineering (Studi Kasus: Desa Sukanegeri Jaya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi (JTISI)*, 2(3), 49–55. <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/JTISI>
- Choudhary, J., Kale, S. D., Patode, S. P., Kamble, R. S., Aatkhile, S. R., Engineer, C., Engineer, C., Engineer, C., & Engineer, C. (2021). Development of Village As a Smart. *International Journal of Scientific & Engineering Research*, 9(6), 395–408. https://www.researchgate.net/profile/Megharima-Datta/publication/340315742_STUDY_AND_DEVELOPMENT_OF_TILLOR_BUZURG_VILLAGE_AS_A_SMART_VILLAGE/links/5e83b77492851c2f5270d8b0/STUDY-AND-DEVELOPMENT-OF-TILLOR-BUZURG-VILLAGE-AS-A-SMART-VILLAGE.pdf
- Dr. Hj Abdul Fattah Nasution, . Pd. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (Issue 112).
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF_DI_BIDANG_PENDIDIKAN.pdf
- Erlianti, D., Tinggi, S., Lancang, I. A., Dumai, K., Gunung, J., No, M., Dumai, B. A., Pelayanan, K., & Jaminan, P. E. (2019). Kualitas Pelayanan Publik Kata Kunci. *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis*, 1(1), 9–18. <http://ejournal.stia-ilk-dumai.ac.id/index.php/japabis>
- Firdaus Suwestian, M., Ghalib, S., Utomo, S., Magister Ilmu Administrasi Bisnis, M., Unlam Banjarmasin, F., Magister Ilmu Administrasi Bisnis, D., & Unlam Banjarmasin Jl Brigjen Hasan Basry Banjarmasin, F. H. (2015). Implementasi Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan Pelayaran (Studi Di PT. Maritim Barito Perkasa Banjarmasin). *Jurnal Bisnis Dan Pembangunan*, 3(1), 1–5.
- Gede Gusta Ardiyasa, & Ety Rahayu. (2022). Implementasi Kebijakan Smart Kampung Di Kabupaten Banyuwangi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 712–728. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2863>
- Herdiana, D. (2019). Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa di

- Indonesia (Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages). *JURNAL IPTEKKOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 21(1), 1. <https://doi.org/10.33164/iptekkom.21.1.2019.1-16>
- Herlina, E. (2013). Meningkatkan Disposisi Berpikir Kreatif Matematis Melalui Pendekatan Apos. *Infinity Journal*, 2(2), 169. <https://doi.org/10.22460/infinity.v2i2.33>
- Herlisa Maulidia. (2019). *Implementasi program smart kampung (Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi)*. 1–19.
- Mahardhika, A. (2018). *Implementasi Program Smart Kampung Bidang Pelayanan Publik di Desa Kampung Anyar*.
- Mulyasa, H. E. (2010). Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). *Kemandirian Guru Dan Kepala Sekolah*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Novan Mamoto, I. S. dan G. U. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Nubatonis, S. E., Rusmiwari, S., Suwasono, S., Studi, P., Administrasi, I., & Tunggadewi, U. T. (2014). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 16–20.
- Nursetiawan, I. (2020). Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Smart village. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 112–120. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/3420>
- Pratama, A. A. (2023). *Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Digital Smart Kampung Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan*. 7823–7830.
- Rahmadana, M. F. (2020). *Pelayanan Publik*.
- Rambutan, K., & Banyuasin, K. (2022). Sosialisasi Dan Pengenalan Konsep Smart Village Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. *JPM Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(11), 2077–2082. <https://bajangjournal.com/index.php/JPM/article/view/4049%0Ahttps://bajangjournal.com/index.php/JPM/article/download/4049/2961>
- Rismawati, S., Pradiani, T. P., & Fathorrahman. (2020). Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia. *Bursa: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 154–171. <https://doi.org/10.59086/jeb.v2i1.242>
- Risnawan, W. (2017). Fungsi Birokrasi Dalam Efektivitas Pelayanan Publik.

Universitas Nusantara PGRI Kediri, 01, 1–7.

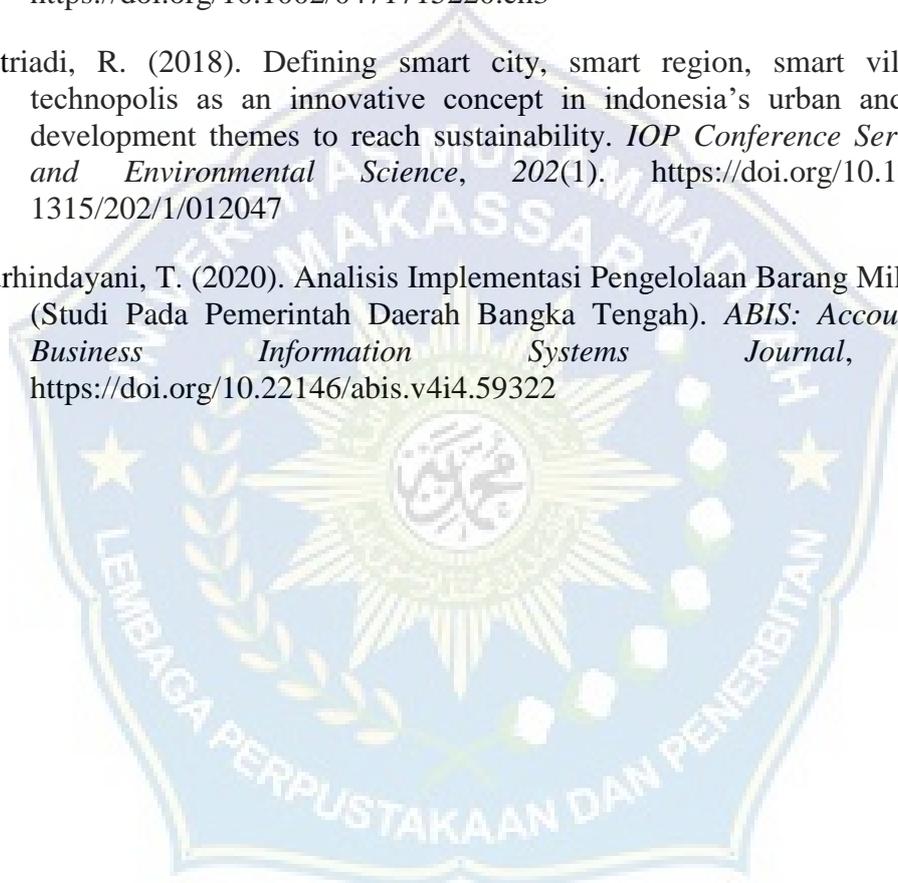
Rosad, A. M. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Manajemen Sekolah. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan, 5*(02), 173. <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074>

Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian.*

Simon, M. K., & Alouini, M. (2004). Types of Communication. *Digital Communication over Fading Channels, 2*, 45–79. <https://doi.org/10.1002/0471715220.ch3>

Sutriadi, R. (2018). Defining smart city, smart region, smart village, and technopolis as an innovative concept in indonesia's urban and regional development themes to reach sustainability. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 202*(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/202/1/012047>

Turhindayani, T. (2020). Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal, 4*(4). <https://doi.org/10.22146/abis.v4i4.59322>



LAMPIRAN

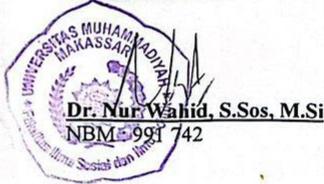
L

A



N

A. Surat Pengantar Penelitian

	Universitas Muhammadiyah Makassar <small>Integrity - Professionalism - Entrepreneurship</small>	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Faculty of Social and Political Sciences <small>Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Mauluddin No. 259 Makassar 90221 Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588 Official Email : fisisip@unismuh.ac.id Official Web : https://fisisip.unismuh.ac.id</small>
		
Nomor	: 0298/FSP/A.1-VIII/III/1445 H/2024 M	
Lamp.	: 1 (satu) Eksamplar	
H a l	: <u>Pengantar Penelitian</u>	
<p>Kep ada Yth. Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh Di – Makassar</p> <p>Assalamu Alaikum Wr. Wb.</p> <p>Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :</p> <p>Nama Mahasiswa : Indriati Yulistiani S t a m b u k : 10561 11182 20 J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara Lokasi Penelitian : Di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai. Judul Skripsi : <i>“Implementasi Smart Desa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai”</i></p> <p>Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih. Jazakumullahu. Khaeran Katziraa. Wassalamu Alaikum Wr. Wb.</p>		
Makassar, 26 Maret 2024 Ketua Jurusan IAN		
 Dr. Nur Wahid, S.Sos, M.Si NBM 993 742		
	Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia Progress for the Nation and Humankind	Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi Public Administration - Government Studies - Communication Science



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3980/05/C.4-VIII/III/1445/2024

26 March 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

16 Ramadhan 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0298/FSP/A.1-VIII/III/1445/2024 tanggal 26 Maret 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **INDRIATI YULISTIANI**

No. Stambuk : **10561 1118220**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"IMPLEMENTASI SMART DESA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN
SINJAI"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 29 Maret 2024 s/d 29 Mei 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Muh. Arief Muhsin, M.Pd.

NBM 1127761



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulseprov.go.id> Email : ptsp@sulseprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 7332/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Sinjai
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3980/05/C.4-VIII/III/1445/2024 tanggal 20 Maret 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: INDRIATI YULISTIANI
Nomor Pokok	: 105611118220
Program Studi	: Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauaddin No. 259, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" Implementasi Smart Desa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **29 Maret s.d 29 Mei 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 26 Maret 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar.
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telpun : (0482) 21069 Fax : (0482) 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

Nomor : 00243/16/01/DPM-PTSP/IV/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Sinjai

Di Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 7332/S.01/PTSP/2024, Tanggal 26 Maret 2024 Perihal Penelitian

Bahwa: Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama : **INDRIATI YULISTIANI**
Tempat / Tanggal Lahir : **Sinjai/10 Juli 2002**
Nama Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
NIM : **105611118220**
Program Studi : **Ilmu Adm. Negara**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Pekerjaan : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Dusun Bungae, Kel./Desa Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai**

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi, Dengan Judul : **IMPLEMENTASI SMART DESA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SINJAI**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 29 Maret s/d 29 Mei 2024
Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
 2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
 3. Menaatii semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
 4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
 5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 02 April 2024

a.n. **BUPATI SINJAI**
KEPALA DINAS,



YUKMAN DAHLAN, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda / Iv
NIP : 197011301990031002

Tembusan diampikan kepada Yth :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar
3. Yang Bersangkutan (Indriati Yulistiani)
4. Arsip



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Indriati Yulistiani
Nim : 105611118220
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	0 %	10 %
2	Bab 2	2 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 05 Agustus 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



.....,M.I.P
..... 904 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Indriati Yulistiani 105611118220

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches



BAB II Indriati Yulistiani 105611118220

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to IAIN Kudus
Student Paper



2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



BAB III Indriati Yulistiani 105611118220

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper		3%
2	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source		2%
3	Submitted to Politeknik Pariwisata Palembang Student Paper		2%
4	www.scribd.com Internet Source		2%
5	Submitted to Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Student Paper		2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

BAB IV Indriati Yulistiani 105611118220

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

id.wikipedia.org
Internet Source



2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

BAB V Indriati Yulistiani 105611118220

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches



B. Rekap Website Desa dan Kelurahan Kabupaten Sinjai

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	DOMAIN	STATUS	TANGGAL BERAKHIR	PLATFORM	STATUS DOMAIN	STATUS HOSTING	STATUS SSL
1	BULUPODDO	Desa Bulu Telue	bulutellue.desa.id	AKTIF	29/05/2029	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
2		Desa Duamparu	duamparu.desa.id	NONAKTIF	13/06/2024	PIHAK KETIGA	AKTIF	EXPIRED	NONAKTIF
3		Desa Lamati Riaja	lamatinaja.desa.id	NONAKTIF	19/01/2025	PIHAK KETIGA	AKTIF	EXPIRED	NONAKTIF
4		Desa Lamati Riatang	lamatriratang.desa.id	NONAKTIF	05/12/2024	PIHAK KETIGA	AKTIF	EXPIRED	NONAKTIF
5		Desa Lamati Riawang	lamatrirawang.desa.id	NONAKTIF	18/01/2025	PIHAK KETIGA	AKTIF	EXPIRED	NONAKTIF
6		Desa Lappacirana	lappacirana.desa.id	NONAKTIF	27/07/2024	PIHAK KETIGA	AKTIF	EXPIRED	NONAKTIF
7		Desa Tompobulu	tompobulu.desa.id	AKTIF	30/05/2027	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
8	PULAU SEMBLAN	Desa Pulau Buhung Pitue	buhungpitue.desa.id	NONAKTIF	31/01/2025	PIHAK KETIGA	AKTIF	EXPIRED	NONAKTIF
9		Desa Pulau Harapan	pulauharapan.desa.id	AKTIF	02/12/2024	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
10		Desa Pulau Padaelo	pulaupadaelo.desa.id	AKTIF	26/07/2027	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
11		Desa Pulau Persatuan	pulaupersatuan.desa.id	AKTIF	05/07/2028	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
12	SINJAI BARAT	Kelurahan Balakia	balakia.sinjakab.go.id	AKTIF	UNLIMITED	WORDPRESS	AKTIF	AKTIF	AKTIF
13		Kelurahan Tassiliu	tassiliu.sinjakab.go.id	AKTIF	UNLIMITED	WORDPRESS	AKTIF	AKTIF	AKTIF
14		Desa Arabika	arabika-sinjabarat.desa.id	AKTIF	01/11/2024	OPEN SID	AKTIF	AKTIF	AKTIF
15		Desa Barania	barania.desa.id	AKTIF	06/04/2025	PIHAK KETIGA	AKTIF	AKTIF	AKTIF
16		Desa Bonto Salama	bontosalama.desa.id	NONAKTIF	24/11/2024	PIHAK KETIGA	AKTIF	EXPIRED	NONAKTIF
17		Desa Botolempangan	botolempangan.desa.id	NONAKTIF	03/05/2024	PIHAK KETIGA	EXPIRED	EXPIRED	NONAKTIF
18		Desa Gunung Perak	gunungperak.desa.id	AKTIF	23/06/2024	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
19		Desa Terasa	terasa-sinjabarat.desa.id	AKTIF	15/10/2024	OPEN SID	AKTIF	AKTIF	AKTIF
20		Desa Turungan Baji	turunganbaji.desa.id	AKTIF	07/10/2024	OPEN SID	AKTIF	AKTIF	AKTIF
21	SINJAI BORONG	Kelurahan Pasir Putih	pasirputih.sinjakab.go.id	AKTIF	UNLIMITED	WORDPRESS	AKTIF	AKTIF	AKTIF
22		Desa Barambang	barambang.desa.id	NONAKTIF	31/01/2025	PIHAK KETIGA	AKTIF	EXPIRED	NONAKTIF
23		Desa Batu Belerang	batubelerang.desa.id	AKTIF	14/10/2028	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
24		Desa Biji Nangka	bijinangka.desa.id	AKTIF	12/10/2024	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	AKTIF
25		Desa Bonto Katute		TIDAK ADA					
26		Desa Bonto Sinala	bontosinala-sinjai.desa.id	AKTIF	23/06/2027	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
27		Desa Bonto Tengnga		TIDAK ADA					
28		Desa Kassi Buleng		TIDAK ADA					
29	SINJAI SELATAN	Kelurahan Sangasseri	sangasseri.sinjakab.go.id	AKTIF	UNLIMITED	WORDPRESS	AKTIF	AKTIF	AKTIF
30		Desa Alenangka		TIDAK ADA					
31		Desa Aska		TIDAK ADA					
32		Desa Bulukamase	bulukamase.desa.id	NONAKTIF	29/08/2024	OPEN SID	AKTIF	EXPIRED	NONAKTIF
33		Desa Gareccing	gareccing.desa.id	NONAKTIF	17/02/2024	PIHAK KETIGA	EXPIRED	EXPIRED	NONAKTIF
34		Desa Palae	palae.desa.id	AKTIF	18/08/2028	OPEN SID	AKTIF	AKTIF	AKTIF
35		Desa Palangka		TIDAK ADA					
36		Desa Polewali	polewali-sinjai.desa.id	AKTIF	18/10/2028	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
37		Desa Puncak		TIDAK ADA					
38		Desa Songing	songing.desa.id	AKTIF	19/10/2027	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
39		Desa Talle	talle-sinjai.desa.id	AKTIF	04/07/2028	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
40	SINJAI TENGAH	Kelurahan Samaenne	samaenne.sinjakab.go.id	AKTIF	UNLIMITED	WORDPRESS	AKTIF	AKTIF	AKTIF
41		Desa Baru	baru-sinjai.desa.id	AKTIF	29/08/2024	PIHAK KETIGA	AKTIF	AKTIF	AKTIF
42		Desa Bonto	bonto.desa.id	AKTIF	15/05/2024	OPEN SID	AKTIF	AKTIF	AKTIF
43		Desa Gantarang	gantarang-sinjalengah.desa.id	AKTIF	12/01/2025	OPEN SID	AKTIF	AKTIF	AKTIF
44		Desa Kanrung	kanrung.id	AKTIF	31/10/2024	PIHAK KETIGA	AKTIF	AKTIF	AKTIF
45		Desa Kompong	kompong.desa.id	AKTIF	19/10/2024	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
46		Desa Mattunreng Telue	mattunrengtelue.desa.id	AKTIF	04/11/2024	PIHAK KETIGA	AKTIF	AKTIF	AKTIF
47		Desa Pattongko		TIDAK ADA					
48		Desa Saohiring	saohiring.desa.id	AKTIF	27/10/2024	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF

49		Desa Saotarre	saotarre.desa.id	AKTIF	05/09/2026	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
50		Desa Saotengnga	saotengnga.desa.id	AKTIF	09/09/2024	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
51	SINJAI TIMUR	Kelurahan Samatarang	samatarang.sinjakab.go.id	AKTIF	UNLIMITED	WORDPRESS	AKTIF	AKTIF	AKTIF
52		Desa Bongki Lengkesa	bongkilingkese-sinjai.desa.id	AKTIF	06/07/2025	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
53		Desa Biroro	biroro.desa.id	AKTIF	12/05/2024	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
54		Desa Kaloing	kaloing.desa.id	AKTIF	02/11/2024	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
55		Desa Kampala	kampala-sinjaitimur.desa.id	AKTIF	12/08/2024	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
56		Desa Lasiai	lasiai.desa.id	AKTIF	06/10/2024	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
57		Desa Panaikang	panaikang.desa.id	AKTIF	23/05/2026	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
58		Desa Pasimarannu	pasimarannu-sinjai.desa.id	AKTIF	04/07/2025	OPEN SID	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
59		Desa Patalassang	patalassang.desa.id	NONAKTIF	19/12/2024	PIHAK KETIGA	AKTIF	EXPIRED	NONAKTIF
60		Desa Salohe	salohe.desa.id	AKTIF	10/10/2024	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
61		Desa Sanjai	sanjai.desa.id	AKTIF	07/10/2027	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
62		Desa Saukang	saukang-sinjai.desa.id	AKTIF	23/06/2028	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
63		Desa Tongke - Tongke	tongketongke.desa.id	AKTIF	14/04/2027	OPEN SID	AKTIF	AKTIF	AKTIF
64	SINJAI UTARA	Kelurahan Aiehanuae	aiehanuae.sinjakab.go.id	AKTIF	UNLIMITED	WORDPRESS	AKTIF	AKTIF	AKTIF
65		Kelurahan Balangnopa	balangnopa.sinjakab.go.id	AKTIF	UNLIMITED	WORDPRESS	AKTIF	AKTIF	AKTIF
66		Kelurahan Binngere	binngere.sinjakab.go.id	AKTIF	UNLIMITED	WORDPRESS	AKTIF	AKTIF	AKTIF
67		Kelurahan Bongki	bongki.sinjakab.go.id	AKTIF	UNLIMITED	WORDPRESS	AKTIF	AKTIF	AKTIF
68		Kelurahan Lamatti Rilau	lamattirilau.sinjakab.go.id	AKTIF	UNLIMITED	WORDPRESS	AKTIF	AKTIF	AKTIF
69		Kelurahan Lappa	lappa.sinjakab.go.id	AKTIF	UNLIMITED	WORDPRESS	AKTIF	AKTIF	AKTIF
70	TELLULIMPOE	Kelurahan Mannano	mannano.sinjakab.go.id	AKTIF	UNLIMITED	WORDPRESS	AKTIF	AKTIF	AKTIF
71		Desa Bua	bua-sinjai.desa.id	AKTIF	05/01/2025	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
72		Desa Era Baru	erabanu-sinjai.desa.id	AKTIF	20/07/2028	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
73		Desa Kalobba	kalobba-tellulimpoe.desa.id	NONAKTIF	30/07/2024	PIHAK KETIGA	AKTIF	EXPIRED	NONAKTIF
74		Desa Lembang Lohe	lebanglohe-tellulimpoe.desa.id	AKTIF	16/09/2024	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
75		Desa Massale	massale.desa.id	AKTIF	29/06/2024	OPEN SID	AKTIF	AKTIF	AKTIF
76		Desa Patongko	patongko-tellulimpoe.desa.id	AKTIF	02/08/2032	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
77		Desa Samaturue		TIDAK ADA					
78		Desa Saotengah	saotengah.desa.id	AKTIF	11/06/2028	SIDEKA-NG	AKTIF	AKTIF	NONAKTIF
79		Desa Sukamaju	sukamaju-tellulimpoe.desa.id	NONAKTIF	05/02/2025	PIHAK KETIGA	AKTIF	EXPIRED	NONAKTIF
80		Desa Tellulimpoe	tellulimpoe-tellulimpoe.desa.id	NONAKTIF	20/11/2024	PIHAK KETIGA	AKTIF	EXPIRED	NONAKTIF

WEBSITE DESA & KELURAHAN - PEMKAB SINJAI

REKAP

C. Dokumentasi Wawancara



Wawancara bersama Pranata Komputer Ahli Muda (Haryanti Arief,S.Si., MM)



**Wawancara Bersama Kaur tata usaha dan umum desa tongke-tongke
(Darmansyah S. AP)**



Wawancara Bersama Sekretaris desa kampala (Muhammad Arfah S. Pd.I)

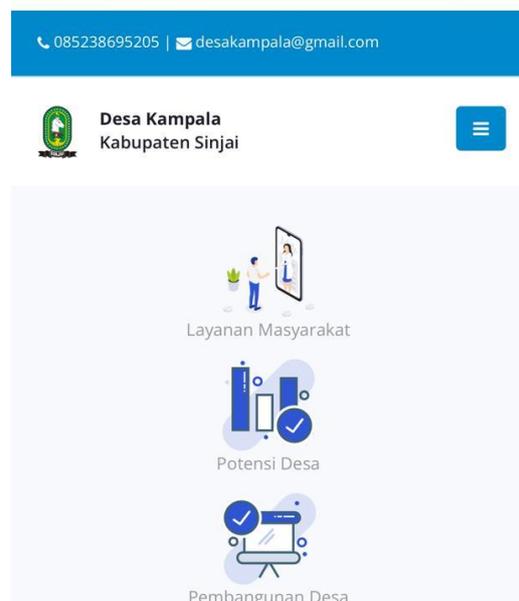
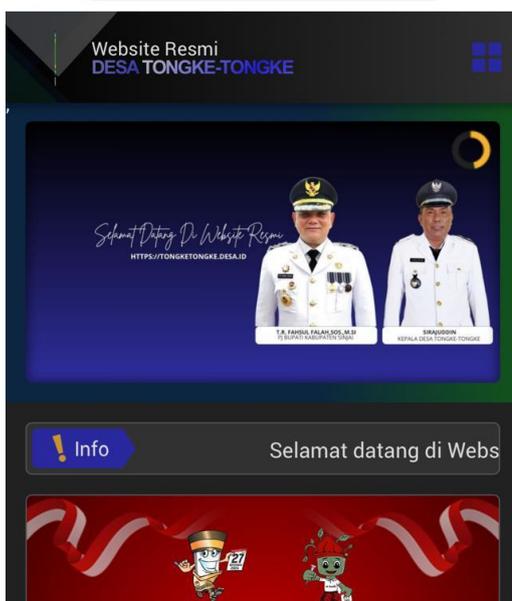


Wawancara Bersama masyarakat setempat (Dewi Fitriani)



Wawancara Bersama masyarakat setempat (Nurlinda)

× tongketongke.desa.id × ala-sinjaitimur.desa.id



Website Desa Tongke-tongke dan Desa Kampala



RIWAYAT HIDUP



Indriati Yulistiani adalah nama penulis skripsi ini. Lahir di Sinjai, pada tanggal 10 Juli 2002. Penulis merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara dan lahir dari pasangan suami istri yaitu, Bapak Ramli dan Ibu Bahma. Kini penulis beralamat di Dusun Bungae, Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 100 Biji Nangka, dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan lagi pada tahun 2014-2016 di MTS Al Markaz Al Isalamy Darul Istiqamah Kab. Sinjai lalu pindah ke MTS Negeri 2 Sinjai pada tahun 2017. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Bulukumba dan tamat pada tahun 2020. Setelah itu, ditahun yang sama penulis dinyatakan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada tahun 2020, dan menyelesaikan Pendidikan pada tahun 2024. Dengan ketekunan belajar serta dukungan dari kedua orangtua, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini diwaktu yang tepat. Pada tanggal 15 agustus 2024, penulis dikukuhkan dengan gelar sarjana Administrasi Publik (S. AP) dengan judul “ Implementasi *Smart* kampung Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai”. Semogah dengan adanya karya ilmiah ini dapat menjadikan kontribusi bagi peneliti lain dan bagi penulis sendiri, terimakasih.